

Pluralisme

Drs. Boedhi Oetojo, MA



PENDAHULUAN

Barang kali konsep yang dianggap paling pas untuk dijadikan rujukan dalam menggambarkan betapa harmonisasi dapat diwujudkan, walaupun kenyataannya belum sampai pada taraf yang ideal, adalah pluralisme. Pluralisme atau keanekaragaman pada hakikatnya merujuk kepada pengelolaan perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan apabila itu terkait dengan golongan-golongan yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pluralisme memang terkait dengan berbagai perbedaan yang seharusnya bersifat dinamis, bukan yang statis, sehingga ia dapat membawa perubahan dalam kehidupan sosial suatu masyarakat. Ia harus dapat mengeliminir unsur-unsur yang dapat memecah belah, ia harus menjadi perekat bagi elemen-elemen pemersatu dengan meredam konflik secara halus.

Pluralisme tidak boleh menjadi faktor penyebab disintegrasi. Ia harus mengatasi berbagai perbedaan dalam kerangka sosio-kultural masyarakat. Konsep pemersatu di dalamnya, meminjam istilah Nurcholis Madjid, harus membumi dan tidak di awang-awang, artinya kemajemukan itu harus dapat mewujudkan integrasi, di mana integrasi yang dilandasi pluralisme harus mengesampingkan primordialisme, untuk sementara, yang selalu menyimpan konflik. Oleh karenanya, setiap orang dan seluruh elemen masyarakat harus memiliki *political will* untuk mewujudkan integrasi nasional.

Mahasiswa yang mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai pluralistik dalam konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia. Secara khusus, mereka diharapkan mampu untuk:

1. menyebutkan berbagai tipe masyarakat multietnis;
2. menyebutkan karakteristik masyarakat majemuk;
3. menjelaskan karakteristik masyarakat majemuk/pluralitas;

4. menjelaskan asumsi-asumsi yang menyebabkan perubahan sosial menurut pendekatan fungsionalisme struktural;
5. menjelaskan asumsi-asumsi yang menyebabkan perubahan sosial menurut pendekatan konflik;
6. menjelaskan karakteristik vertikal terkait dengan konsep pluralitas;
7. menjelaskan karakteristik horizontal terkait dengan konsep pluralitas;
8. menjelaskan perbedaan antara karakteristik vertikal dengan karakteristik horizontal terkait dengan konsep pluralitas;
9. menjelaskan kegunaan dari penelitian multietnik;
10. menjelaskan konsep pluralitas di Indonesia pada jaman Hindia Belanda;
11. menjelaskan konsep masyarakat majemuk menurut Furnivall;
12. menjelaskan konsep pluralitas masyarakat Indonesia setelah Kemerdekaan;
13. menjelaskan terciptanya faktor-faktor terciptanya pluralitas di Indonesia;
14. menjelaskan penyebab timbulnya konflik terkait dengan pluralitas;
15. menjelaskan konsep transformasi sosio-kultural terkait dengan pluralitas;
16. menjelaskan landasan dasar yang diperlukan dalam proses integrasi;
17. menjelaskan melalui contoh-contoh mengenai sifat pluralistik masyarakat Indonesia;
18. menjelaskan konsep integrasi;
19. menjelaskan konsep integrasi nasional;
20. menjelaskan faktor-faktor yang menghambat proses integrasi nasional;
21. menjelaskan pluralitas agama sebagai faktor pemersatu dan faktor penghambat integrasi nasional;
22. menjelaskan peta politik pada jaman Orde Baru;
23. menjelaskan peranan etnis Tionghoa di Indonesia;
24. menjelaskan peran sistem ekonomi politik di Indonesia dalam kaitannya dengan kondisi pluralitas masyarakat di Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 1**Pluralisme, suatu Realitas Masyarakat Multietnik****A. KONSEP PLURALITAS MASYARAKAT**

Masalah-masalah kemasyarakatan dianggap sangat penting dan menarik bagi banyak negara di dunia pada saat ini. Sifatnya yang majemuk, yang pluralistik, sering kali merujuk kepada keragaman bahasa, agama, lapisan sosial dan kasta, ras, serta kebudayaan suku bangsa. Keragaman itu pada umumnya terdapat di negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi ada kalanya juga terdapat di negara-negara yang telah maju (Mutakin dan Pasya, 2001; Koentjaraningrat, 1988). Dari seluruh anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berjumlah 157 negara itu hanya sekitar 17 negara saja yang memiliki masyarakat yang beragam, artinya semua masyarakat di negara-negara itu memiliki kebudayaan yang sama dengan suku bangsa yang dominan yang ada di sana. Terkait dengan masalah ketenteraman dan keamanan nasional maka negara-negara dengan masyarakat yang multietnik tentu lebih sulit menjaganya daripada menjaga ketenteraman dalam negara-negara yang masyarakatnya homogen. Asumsi bahwa di dalam negara yang telah maju ekonominya, keragaman budaya suku bangsa tidak akan mengganggu ketenteraman negara karena penduduknya sudah merasa puas dengan kemakmuran yang dicapai serta dapat berpikir secara rasional dan praktis, dibantah oleh kenyataan atas terjadinya berbagai peristiwa konflik antar suku bangsa dan gerakan etnik yang dilancarkan untuk memisahkan diri, seperti yang kini terjadi di beberapa negara maju di Eropa. Suku bangsa Scot dan suku bangsa Welsh misalnya, melakukan gerakan untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dari Inggris. Suku bangsa Breton dan penduduk Pulau Corsica menginginkan otonomi yang lebih besar dari Prancis. Warga negara Kanada yang berbahasa Prancis di Quebec menghendaki pemisahan dari Kanada. Suku bangsa Serb, Croats, Slovene, Islam Bosnia, dan Islam Albania tetap menjaga identitas mereka dengan kuat di negara komunis Yugoslavia. Suku bangsa Vlaam dan suku bangsa Vallon menginginkan pembentukan negara federasi di Belgia; sedangkan suku bangsa Basque berjuang untuk memisahkan diri dari Spanyol. Di negara-

negara yang sedang berkembang di mana pemerintahnya belum mampu menjamin kesejahteraan dan keamanan hidup warganya secara penuh, masyarakat multi-etnik yang terdiri dari beragam suku bangsa akan lebih sulit diatur. Negara-negara seperti itu biasanya pernah menjadi jajahan negara lain, dan batas-batas wilayahnya biasanya tidak mengikuti batas-batas wilayah dari suku-suku yang ada. Selain mencakup suku bangsa yang berbeda-beda, yang di jaman lalu mereka mungkin saling bermusuhan, batas-batas wilayah negara kolonial sering kali juga memotong wilayah salah satu suku bangsa. Seperti misalnya wilayah timur negara jajahan Hindia Belanda yang kini menjadi batas timur wilayah negara Indonesia. Pada perundingan yang dilakukan antara wakil-wakil dari negara Belanda dan Inggris, batas tersebut ditarik mengikuti garis 141° Bujur Timur yang terlihat di peta, tanpa memiliki pengetahuan sedikit pun mengenai keadaan sebenarnya. Karena itu garis batas tersebut memotong wilayah suku bangsa Arso dan Senggi yang kini untuk sebagian termasuk Propinsi Papua dan sisanya termasuk wilayah Papua Nugini. Untuk menjaga kesatuan antarsuku bangsa warga suatu negara baru yang sedang berkembang maka pemerintah perlu memasukkan program-program untuk menumbuhkan toleransi serta sikap saling mengakui dan menghormati sesama suku bangsa, golongan agama, ras dan kelas sosial untuk dimasukkan ke dalam rencana pembangunannya. Hal ini terutama perlu dilakukan di daerah-daerah di mana golongan-golongan tadi bertemu dan bersaing untuk memperoleh aksesibilitas dalam bidang-bidang ekonomi, politik, dan pendidikan yang jumlahnya sangat terbatas. Daerah-daerah itu adalah daerah-daerah kota, daerah pusat pembangunan industri, dan daerah transmigrasi.

Berdasarkan sejarah, asal-mula, komposisi penduduk, dan sifat-sifat dari kebudayaan nasional dari negara-negara yang bersangkutan, menurut Young (Koentjaraningrat, 1988) di dunia ini setidaknya ada delapan tipe masyarakat multi-etnik. *Tipe pertama*, terdapat di sebagian besar dari negara-negara maju di Eropa Barat. Penduduknya terdiri dari sejumlah suku bangsa, di mana salah satu suku bangsa itu merupakan suku bangsa yang dominan, sedangkan sisanya adalah suku-suku bangsa minoritas. Di sini, kebudayaan dari suku bangsa yang dominan itu merupakan kebudayaan perkotaan yang telah berusia ratusan tahun. Di Eropa Timur, ada juga negara-negara yang serupa dengan negara-negara yang terdapat di Eropa Barat, di mana negara-negara di Eropa Timur itu masih mengandalkan ekonomi pertanian karena sektor ini masih merupakan sektor yang sangat penting. Contohnya adalah Hongaria

yang penduduknya didominasi oleh bangsa Magyar, juga negara-negara Polandia, Rumania, Bulgaria, dan Albania. *Tipe kedua*, ditemukan di negara-negara yang ditinggali oleh keturunan para imigran yang berasal dari Eropa hampir satu abad yang lampau dan menjadi dari penduduk atau suku bangsa yang dominan. Kebudayaan nasional dan bahasa nasional dari negara-negara ini adalah kebudayaan dan bahasa para imigran tadi. Penduduk pribumi maupun para imigran yang bukan Bangsa Eropa yang datang kemudian, dipandang sebagai warga negara kelas dua atau sebagai penduduk minoritas yang tidak penting dan bahkan ada beberapa suku pribumi yang dipunahkan. Beberapa negara tipe kedua ini tergolong negara yang paling maju ekonominya di dunia seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Kecuali itu ada sejumlah negara yang tergolong kurang berkembang ekonominya seperti negara-negara Amerika Latin dan negara-negara Afrika Selatan. *Tipe ketiga* adalah negara-negara yang wilayahnya merupakan daerah asal dari bangsa-bangsa yang dipindahkan atau bermigrasi ke Amerika atau Eropa. Penduduk negara-negara ini, pada umumnya, keturunan dari bangsa-bangsa yang dipindahkan atau bermigrasi tadi, yang kemudian dikembalikan lagi ke daerah asalnya masing-masing oleh kekuatan-kekuatan politik dari negara-negara maju di Amerika atau Eropa. Contohnya adalah Liberia di Afrika Barat dan Israel, dua negara yang sedang berkembang ekonominya. Masyarakat multietnik di kedua negara tersebut terdiri dari bangsa-bangsa yang dipulangkan ke sana dan menjadi golongan yang berkuasa. Penduduk yang sudah ada lalu menjadi golongan minoritas di negara itu. *Tipe keempat* terdapat di negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki peradaban kuno dan kerajaan-kerajaan tradisional, serta memiliki sejarah yang panjang. Suku-suku bangsa kerajaan adalah suku-suku bangsa yang berkuasa di dalam masyarakat, sedangkan suku-suku bangsa lainnya di wilayah negara-negara tersebut hanya menjadi penduduk minoritas. Hampir semua negara ini pernah dijajah oleh salah satu negara Eropa Barat, dan kini tergolong sebagai negara dengan ekonomi yang sedang berkembang. Ketika kekuasaan penjajah tergeser sehabis Perang Dunia II, muncul negara-negara merdeka yang masih memiliki sistem kerajaan, seperti Maroko, Swazi, Kuwait, Oman, Qatar, Nepal, Laos, dan Malaysia. Namun ada pula negara-negara yang baru merdeka yang sudah menghapuskan sistem kerajaan yang ada sejak jaman penjajahan, seperti Libia, Madagaskar, dan Birma. Sebaliknya, ada negara-negara yang menjadi merdeka setelah sistem Kerajaannya digulingkan oleh gerakan politik dan revolusi, seperti yang terjadi di Tunisia, Rwanda,

Burundi, Mesir, Vietnam, dan Kamboja. *Tipe kelima* terdapat pada beberapa negara saja yang ada di Afrika dan Asia yang juga memiliki peradaban kuno dan kerajaan tradisional dengan sejarah yang panjang pula. Di sini, suku bangsa yang berkuasa adalah suku bangsa kerajaan, sedangkan suku-suku bangsa lainnya tergolong sebagai suku minoritas. Hanya saja, berbeda dengan suku bangsa tipe keempat, negara-negara yang tergolong ke dalam tipe kelima ini tidak pernah dijajah oleh suatu negara Eropa Barat, kecuali mungkin oleh pendudukan militer yang tidak banyak membekas pada masyarakatnya. Sistem kerajaan tradisional di sini digulingkan oleh gerakan revolusi, seperti yang terjadi di Etiopia, Iran, Afghanistan, dan Cina, atau sistem kerajaan itu berubah dan menyesuaikan diri dengan jaman modern seperti yang terjadi di Muangthai. *Tipe keenam*, terdapat di negara-negara yang mula-mula terbentuk oleh sistem kolonial. Penduduk yang dominan adalah para migran yang dibawa kaum penjajah dari daerah-daerah Afrika atau Asia untuk dijadikan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan atau di pertambangan-pertambangan. Pada akhir jaman kolonial, kedaulatan jatuh ke tangan para penduduk migran tadi. Kebudayaan nasional dari negara yang baru ini adalah kebudayaan dari para penguasa yang datang ke daerah itu sebagai migran. Suku-suku bangsa pribumi di dalam negara-negara tersebut adalah penduduk yang kebudayaannya masih terbelakang dan merupakan minoritas yang tidak berarti. Contohnya, Guyana, Jamaika, Barbados, Trinidad dan Suriname di Amerika Latin, serta Singapura di Asia Tenggara. *Tipe ketujuh*, adalah terdapat di negara-negara dengan batas-batas wilayah yang ditentukan oleh sejarah kolonialisme. Suku-suku bangsa yang tinggal di dalam negara seperti itu disatukan oleh pengalaman yang sama, yaitu pernah dijajah oleh salah satu bangsa dari Eropa Barat. Semua suku bangsa merasa dirinya mempunyai kedudukan yang sama sebagai suatu negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, hal-hal yang terkait dengan pembentukan identitas nasional, solidaritas nasional, ideologi nasional, dan kebudayaan nasional merupakan bagian yang penting di dalam pembangunan nasionalnya. Contohnya Nigeria, Zaire, Kamerun, Kenya, dan Uganda yang berada di Afrika, sedangkan yang berada di Asia adalah Yordania dan Philipina. *Tipe kedelapan*, seperti halnya tipe ketujuh, negara-negara dengan tipe ini adalah negara-negara dengan batas-batas wilayah yang ditentukan oleh sejarah kolonialisme. Suku-suku bangsa yang tinggal di dalamnya disatukan oleh pengalaman yang sama yaitu pernah dijajah oleh suatu bangsa dari Eropa Barat. Semua suku bangsa menganggap dirinya sama tinggi

kedudukan dan derajatnya sehingga pembentukan identitas nasional, solidaritas nasional, ideologi nasional, dan kebudayaan nasional merupakan bagian dari upaya pembangunan nasionalnya. Hanya saja, bedanya dengan negara-negara pada tipe ketujuh adalah bahwa ada beberapa suku bangsa di sini yang memiliki peradaban yang sangat tua serta memiliki sejarah kebudayaan yang panjang sehingga ada persamaan unsur-unsur dan nilai-nilai kebudayaan yang secara esensial sama dengan kebudayaan-kebudayaan dari tiap-tiap suku bangsa yang ada. Kadang-kadang bahkan ada suatu bahasa nasional yang dipahami oleh sebagian besar warga dari mayoritas suku-bangsa di negara yang bersangkutan. Contoh dari negara-negara ini adalah Tanzania, Aljazair, Syria, Irak, Pakistan, India, Sri Lanka, Indonesia. Di Eropa juga ada negara-negara seperti itu, yaitu Czeskoslovakia dan Yugoslavia, dua negara yang sedang berkembang, serta Belgia dan Swiss, dua negara dengan ekonomi yang telah maju. (Lihat tulisan Koentjaraningrat *Masyarakat dan Kebudayaan*, 1988)

Pluralisme atau kemajemukan suatu masyarakat itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara horizontal dan secara vertikal (Mutakin dan Pasya, 2003; Radjab, 1996). Masyarakat secara horizontal dilihat dari kenyataan yang menunjukkan adanya satuan-satuan sosial yang keragamannya dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat atau tradisi, serta unsur-unsur Kedaerahan lainnya. Perbedaan secara horizontal ini diartikan sebagai perbedaan yang tidak diukur berdasarkan kualitas dari unsur-unsur yang membentuk keragaman tersebut. Contohnya, perbedaan bahasa daerah tidak diartikan bahwa bahasa daerah dari suatu suku bangsa A, misalnya, itu lebih baik dan lebih hebat dari bahasa daerah suku bangsa B. Atau tradisi suku bangsa Z itu lebih buruk dan tidak bernilai dibanding tradisi suku bangsa X. Bukan itu yang dimaksudkan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang vertikal, bahwa pemahaman kemajemukan itu dipandang atas dasar perbedaan-perbedaan yang bersifat vertikal, yaitu bahwa perbedaan dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut dapat diukur berdasarkan kualitas atau bobotnya. Misalnya, perbedaan dalam aspek ekonomi akan ditandai dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi, menengah, dan kelompok-kelompok dengan tingkat ekonomi lemah. Kemudian juga ada kelompok masyarakat dengan pendidikan yang tinggi, menengah, rendah, dan kelompok buta huruf. Lalu ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan, ada daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi ada juga

daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Ada daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia yang besar dan berkualitas, tetapi ada juga yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa daerah telah memiliki sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi yang sangat maju, tetapi ada juga daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas tersebut dan sangat tertinggal kemajuan sosial ekonominya.

Van den Berghe (dalam Nasikun, 1991), terkait dengan hal ini, mengemukakan bahwa masyarakat yang majemuk itu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, *pertama*, mereka itu terbagi-bagi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang satu sama lain memiliki sub-kebudayaan yang berbeda. *Kedua*, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam beberapa lembaga non-komplementer (yang tidak saling melengkapi). *Ketiga*, tidak begitu memfokuskan kepada adanya konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang sangat mendasar. *Keempat*, relatif sering mengalami konflik di antara kelompok-kelompok mereka sendiri. *Kelima*, integrasi sosial lebih sering karena adanya paksaan dan adanya saling ketergantungan di bidang ekonomi, dan *keenam* terciptanya dominasi politik oleh suatu kelompok kepada kelompok lain. Bagi Mutakin dan Pasya (2003) karakteristik-karakteristik tersebut sebenarnya tidak dapat diterapkan di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menurut mereka, karakteristik yang disebutkan di atas itu tidak begitu sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia karena kehidupan sosial yang terpisah itu terjadi di jaman pendudukan Belanda. Memang, seperti yang dikemukakan oleh Furnivall bahwa masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen yang hidup secara sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik. Jadi memang, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia setelah Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dengan sumpah satu bangsa, satu tanah air, serta satu bahasa nasional merupakan landasan perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dengan mengesampingkan masalah Kedaerahan. Berkaitan dengan pluralitas bangsa di Indonesia, Ruslani (2005) mengungkapkan bahwa nasionalisme dalam konteks kolonial dihadapkan pada berbagai persoalan yang sangat spesifik. Tidak seperti negara-negara Eropa yang memiliki basis linguistik bagi identitas nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan batas-batas negara yang di dalam dunia kolonialisme adalah batas-batas negara yang telah ditetapkan secara arbitrari oleh para penguasa kolonial. Pasca kolonialisme memang menjadikan Indonesia memiliki begitu banyak

keragaman etnik, agama, bahasa, dan budaya. Oleh karenanya, berbagai upaya dalam membangun identitas nasional akan memunculkan berbagai perbedaan persepsi dan pemaknaan atas identitas (nasional) itu. Hal itu terjadi karena adanya identitas individu yang selalu dikaitkan dengan apa yang disebut *narrative identity* yaitu ceritera-ceritera yang dimiliki individu atau kelompok yang telah menjadi sejarah. Terlepas dari konteks wilayah dan jaman, Patji' (2001) menegaskan bahwa kecenderungan melakukan penyeragaman terhadap suatu masyarakat bangsa dan negara yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, agama, dan kebudayaan, akan selalu berarti mengingkari atau mengabaikan makna keunikan (*uniqueness*), kekhasan, serta perbedaan yang ada dan berkembang di dalamnya. Kecenderungan tersebut juga cenderung (akan) menempatkan suku bangsa tertentu yang warga komunitasnya lebih banyak (suku bangsa dengan warga mayoritas), sebagai komunitas yang merasa berhak mengatasnamakan dirinya *mewakili masyarakat* bangsa dan negara secara keseluruhan. Apalagi bila kecenderungan ini dibarengi dengan penggunaan slogan *demokrasi*. Padahal sikap mengklaim seperti itu akan selalu cenderung mendekati kepada sikap ekstrem, represif, otoriter, dan benar menurut ukuran diri sendiri, serta cenderung menyalahkan orang lain. Sikap demikian itu juga bukan hanya menisbikan berbagai perbedaan yang ada tetapi juga menumbuhkan sikap arogansi dan superior terhadap pihak lain sehingga cenderung merendahkan orang lain.

Barangkali menarik untuk disimak dan dicermati, bahwa menurut para pakar sosiologi Barat, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* itu masih merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan dan diwujudkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai suatu realitas yang benar-benar nyata (Nasikun, 1984). Dalam pada itu, kenyataan bahwa gagasan-gagasan mengenai persatuan nasional senantiasa muncul setiap kali bangsa Indonesia sedang diancam oleh berbagai pertentangan pendapat yang cukup gawat di antara berbagai kekuatan sosial politik tertentu, barangkali memang benar bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* itu masih merupakan cita-cita bangsa yang masih harus diperjuangkan secara terus menerus. Konflik memang juga mewarnai upaya-upaya dalam mewujudkan integrasi nasional itu, tetapi konflik yang dialami itu belumlah separah konflik yang dialami Malaysia atau India, namun demikian hal itu bukan berarti masalah konflik dan integrasi nasional itu sudah tidak dihadapi lagi oleh bangsa Indonesia. Bahkan masalah konflik dan integrasi nasional itu masih tetap menjadi

masalah yang rawan bagi bangsa Indonesia untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini seiring dengan proses pembangunan yang makin meningkat di mana berbagai konflik kepentingan dari berbagai golongan akan mencuat dan saling bersinggungan.

Bagi Nasikun (1984), konflik itu pada hakikatnya merupakan suatu gejala sosial yang melekat dalam kehidupan setiap masyarakat, dan oleh karenanya melekat pula dalam kehidupan setiap bangsa. Akan tetapi berbagai konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat selalu memiliki pola dan intensitasnya sendiri-sendiri. Hal ini karena adanya berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Selain itu juga adanya sumber konflik yang bersifat laten yang menimbulkan berbagai konflik sosial. Hal ini memang harus dipahami oleh bangsa Indonesia dalam upaya mengantisipasi berbagai konflik yang timbul itu. Secara psikologis, kita enggan mengakui bahwa kita memiliki konflik, kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kita memiliki konflik. Hal ini karena kita beranggapan bahwa konflik itu merupakan suatu noda bagi persatuan yang kita bangun, noda bagi nilai-nilai kebersamaan seperti semangat gotong-royong, artinya hal itu dianggap menodai semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Peningkaran inilah, sesungguhnya yang akan membawa kita terjerumus ke dalam konflik-konflik yang semakin dalam dan tajam. Semua menjadi terpendam, ibarat api dalam sekam, yang sewaktu-waktu dapat meletus dengan hebatnya. Untuk meredam hal ini, Nasikun (1984) mengajukan dua pendekatan yaitu *pendekatan fungsionalisme struktural* dan *pendekatan konflik*. Pendekatan fungsionalisme struktural pada dasarnya melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan, saling mempengaruhi secara timbal balik, bergerak ke arah *equilibrium* (keseimbangan) yang bersifat dinamis, yang merespons pengaruh dan perubahan dari luar. Konflik di sini akan dapat teratasi dengan sendirinya (dalam jangka panjang) melalui adaptasi dan proses institusionalisasi yang terjadi secara gradual, perlahan, secara evolusioner. Perubahan sosial yang terjadi di sini, timbul melalui adaptasi yang dilakukan sistem sosial atas perubahan eksternal, juga melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, serta melalui penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat. Hanya saja faktor yang paling penting dan dianggap memiliki daya integratif bagi suatu sistem sosial adalah konsensus di antara anggota masyarakat. Menurut pandangan fungsionalisme struktural, setiap masyarakat memiliki tujuan dan prinsip-prinsip tertentu di mana sebagian besar anggota

masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang mutlak benar. Sistem nilai inilah yang merupakan sumber dari integrasi sosial yang sekaligus merupakan unsur penyeimbang suatu sistem sosial budaya.

Pluralisme, dalam implementasinya, memang merujuk kepada konsep keseimbangan yang memelihara hubungan keragaman atau pluralitas serta memelihara perbedaan melalui faktor-faktor kesamaan, pengikat, dan kesatuan. Smith (1969), menggambarkan konsep keseimbangan itu sebagai penggabungan kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda ke dalam suatu masyarakat politik. Sebagai konsekuensinya, sisi ekstrem dari keseimbangan itu memang merupakan bibit-bibit disintegrasi yang dapat menimbulkan kekacauan karena semua motivasi-motivasi untuk bersatu menjadi terabaikan. Furnivall (1967) sendiri, dalam kaitan ini menyatakan, bahwa pluralisme sebenarnya merujuk kepada suatu masyarakat yang terdiri dari dua elemen atau lebih di mana elemen-elemen itu hidup secara sendiri-sendiri, terpilah-pilah tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Bila dilihat konsep dasar pluralisme yang dikemukakan oleh Smith dan Furnivall maka akan ditemui perbedaan yang dipengaruhi oleh konteks wilayah dan kurun waktu saat suatu masyarakat menjadi objek yang diamati (Patji, 2001). Batasan pluralitas Smith itu merupakan gambaran yang didasarkan pada kondisi yang terjadi di Afrika tahun 60-an. Sedangkan batasan pluralitas Furnivall merujuk kepada kondisi masyarakat Indonesia Jaman Hindia-Belanda, yang menurut Horowitz (1985) keragaman masyarakat yang dimaksud oleh Furnivall itu meliputi keragaman atau perbedaan dalam kebudayaan, pembatasan hubungan-hubungan silang budaya yang mengacu kepada hubungan ekonomi, spesialisasi ekonomi karena adanya sektor-sektor budaya, dan konsep-konsep pembagian kerja berdasarkan suku bangsa, adanya ketimpangan nilai-nilai kebersamaan, dan tidak adanya kemauan bersama untuk bersatu. Sementara, konsepnya Smith merupakan rumusan kebudayaan masyarakat plural sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar hanya keragaman budaya di mana masyarakat yang benar-benar bersifat plural hanyalah apabila ada suatu keragaman yang secara resmi diakui melalui sistem kelembagaan yang cenderung mengarah kepada integrasi dan kekentalan internal, sementara eksistensi kelompok-kelompok yang berbeda cenderung membentuk suatu kesatuan sosiokultural yang berdekatan.

Dalam konteks ini Patji (2001) menjelaskan bahwa pada hakikatnya primordialisme juga mengandung sifat-sifat yang terdapat di dalam konsep

pluralisme. Hal ini karena konsep *primordial* pada dasarnya merujuk kepada pemikiran yang mengutamakan kepentingan kelompok. Konsep yang mengandung sikap menonjolkan diri atau sikap arogansi ini apabila hanya terjadi di dalam kelompok internal saja sebenarnya tidak begitu menjadi masalah. Tetapi dalam skala luas, yaitu pada interaksi antara kelompok atau komunitas di luar komunitas sendiri hal itu akan memunculkan perasaan tidak nyaman, rasa tidak adil, dan menyebabkan ketimpangan sosial. Keadaan ini lalu akan menimbulkan apa yang dinamakan *primordial sentiment* (Geertz, 1973) atau sentimen primordial. Sentimen primordial ini pada dasarnya merujuk pada ikatan-ikatan dan perasaan yang timbul yang menggambarkan keragaman yang dimiliki seseorang atau kelompok yang menyebabkan sikap persamaan nasib dari kelompok yang bersangkutan. Memang, fenomena primordial di dalam masyarakat Indonesia yang begitu majemuk itu sangat relevan karena struktur majemuk masyarakat Indonesia, seperti yang dikemukakan Furnivall, itu sangat khas dan unik yaitu bersifat vertikal (ini dapat dilihat dari adanya struktur masyarakat di mana perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah terlihat sangat tajam), dan juga bersifat horizontal (yang terlihat dari adanya berbagai suku bangsa, agama, dan daerah) di mana sifat-sifat itu dipengaruhi juga oleh ikatan-ikatan primordialistik.

Dapatkah Anda menjelaskan mengenai beberapa karakteristik masyarakat majemuk seperti yang didikemukakan oleh van den Berghe?

Terkait dengan semua penjelasan di atas, barangkali asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik dapat membantu menjelaskan mengenai konsep perubahan sosial yang disebabkan oleh (adanya) keragaman dan upaya-upaya menciptakan keseimbangan sosial. Kenyataannya, anggapan bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk menciptakan suatu stabilitas atau *equilibrium* berdasar konsensus para anggota masyarakat, mengakibatkan para penganut pendekatan fungsionalisme struktural, bila kita melihatnya dari konsep pemahaman pendekatan fungsionalisme struktural, menganggap bahwa semua disfungsi, semua ketegangan, dan berbagai penyimpangan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial berupa timbulnya diferensiasi sosial yang semakin kompleks, merupakan akibat dari pengaruh faktor-faktor

yang datang dari luar. Kecenderungan, asumsi, atau anggapan di atas sesungguhnya *mengabaikan* beberapa hal berikut, *pertama* bahwa setiap struktur sosial itu, di dalam dirinya sendiri, mengandung berbagai konflik dan kontradiksi yang bersifat internal yang merupakan sumber dari terjadinya berbagai perubahan. *Kedua*, reaksi dari suatu sistem sosial terhadap adanya berbagai perubahan yang datang dari luar itu tidak selalu bersifat adaptif. *Ketiga* bahwa sistem sosial, dalam jangka panjang, dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat *vicious circle*, yang tidak pernah berhenti. *Keempat*, berbagai perubahan sosial tidak selalu terjadi secara evolusioner akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner. Atas hal ini, pendekatan fungsionalisme struktural, oleh para ahli sosiologi, dianggap sebagai pendekatan yang kurang mampu untuk melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan perubahan sosial. Menurut Nasikun (1984) pendekatan fungsional struktural dianggap tidak saja mengabaikan kenyataan bahwa konflik dan kontradiksi internal merupakan sumber dari terjadinya perubahan sosial, akan tetapi juga tidak memberikan tempat yang selayaknya pada kenyataan bahwa suatu sistem sosial tidak selalu mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan eksternal. Suatu sistem sosial sering kali mampu untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan eksternal tanpa mengalami disintegrasi sosial. Atas kondisi tersebut maka anggapan-anggapan yang dikemukakan oleh pendekatan fungsionalisme struktural justru menjadi fokus perhatian dari para penganut pendekatan konflik. Berbeda dengan asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh pendekatan fungsionalisme struktural maka asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh pendekatan konflik menyatakan bahwa *pertama*, setiap masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang berlangsung secara sinambung, *kedua* di dalam setiap masyarakat terkandung berbagai konflik, yang *ketiga* setiap unsur yang ada di dalam masyarakat itu berkontribusi atas timbulnya disintegrasi dan berbagai perubahan sosial, sedangkan yang *keempat*, adalah bahwa setiap masyarakat itu tereintegrasi karena adanya dominasi oleh sejumlah orang terhadap orang lain (Nasikun, 1984). Kontradiksi, konflik, dan perubahan sosial di dalam suatu masyarakat, menurut pandangan konflik, bersumber dari adanya pembagian wewenang yang tidak merata. Pembagian wewenang (yang tidak merata) inilah yang selalu menimbulkan perbedaan kategori sosial di dalam masyarakat yaitu adanya kelompok yang memiliki otoritas (wewenang) dan kelompok yang tidak memiliki otoritas. Pembagian otoritas yang dikotomis itulah yang selalu dianggap dapat menimbulkan

konflik karena adanya gesekan berbagai konflik kepentingan di dalam masyarakat. Atas hal ini, ada asumsi bahwa masyarakat itu pada dasarnya terwujud dari adanya berbagai konflik (Hisyam, 2001; Radjab, 1996). Setiap unsur di dalam masyarakat memberi kontribusi atas timbulnya disintegrasi sosial. Dinamika sosial juga terwujud karena adanya konflik-konflik tersebut sehingga setiap masyarakat akan mengalami perubahan. Di balik itu, integrasi sosial juga terwujud karena adanya dominasi sejumlah orang atas sejumlah orang lainnya. Rajab (1996) yang juga merujuk kepada studinya Furnivall, selanjutnya menambahkan bahwa sebenarnya di dalam setiap masyarakat itu terdapat (potensi akan timbulnya) konflik dan ini biasanya merupakan konflik kepentingan antar berbagai kelompok. Bila melihat masyarakat majemuk di jaman Hindia Belanda, ia memberikan contoh, konflik itu menjadi lebih tajam karena adanya perbedaan kepentingan sosial dan ekonomi yang timbul secara bersamaan dengan adanya perbedaan rasial.

Oleh karenanya, pandangan para penganut pendekatan konflik, meskipun memiliki kelemahan, tetapi pada dasarnya merupakan upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang ada pada pandangan fungsionalisme struktural. Tidak saja Nasikun (1984) yang mengusulkan untuk menggabungkan kedua pendekatan itu demi membentuk suatu pendekatan yang saling melengkapi, tetapi juga hal ini disinggung oleh Van Den Berghe (1969) yang menyatakan bahwa sintesa antara kedua pandangan itu diperlukan mengingat bahwa keduanya memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, antara lain, *pertama*, keduanya memiliki sifat *holistic* atau sifat-sifat universal. *Kedua*, bahwa kedua pandangan itu juga sama-sama dapat berperan ganda terkait dengan perubahan sosial. *Ketiga*, keduanya memandang proses perubahan sosial sebagai perubahan yang bersifat evolusioner. *Keempat*, keduanya dapat dikategorikan sebagai model penyeimbang atau *equilibrium model* terkait dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Menyambung pendapatnya Nasikun, Lockwood (dalam Nasikun, 1984) juga menegaskan bahwa di dalam setiap masyarakat itu selalu terdapat fenomena konsensus dan konflik. Oleh karenanya, dua pendekatan dengan memiliki asumsi-asumsi yang memiliki anggapan dasar yang menekankan pada salah satu di antara kedua gejala itu sebaiknya diintegrasikan. Konsep integrasi ini juga menjadi penting artinya manakala dihadapkan pada *keharusan* menganalisa (struktur) masyarakat Indonesia yang ditandai oleh dua karakteristik yang bersifat unik. *Pertama*, adalah karakteristik yang bersifat horizontal di mana hal ini tergambar dalam kesatuan-kesatuan atau unit-unit

sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat-istiadat, serta perbedaan Kedaerahan. *Kedua*, adalah karakteristik yang bersifat vertikal di mana hal itu ditunjukkan dengan adanya berbagai perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang digambarkan secara tajam.

Perbedaan di dalam karakteristik horizontal seperti perbedaan-perbedaan yang menyangkut suku bangsa, agama, adat-istiadat, dan Kedaerahan yang sering kali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia, yang menurut Furnivall (1967), bersifat majemuk, yang menggambarkan kemajemukan masyarakat Indonesia jaman Hindia-Belanda. Menurutnya, masyarakat Indonesia jaman Hindia Belanda itu merupakan suatu masyarakat majemuk yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada (proses) pembauran satu dengan lainnya dalam suatu kesatuan politik. Digambarkan oleh Furnivall (1967), bahwa sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia saat itu merupakan masyarakat di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda, sebagai golongan minoritas pada akhir abad ke 19, merupakan penguasa yang memerintah orang-orang Indonesia pribumi (yang waktu itu dinamakan golongan Pribumi) yang merupakan golongan mayoritas tetapi menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Sedangkan golongan orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya dan masih kalah besar dengan golongan Bumiputra dalam jumlah, menempati kedudukan menengah di antara orang Belanda dan orang Indonesia. Mengenai adanya perbedaan ras ini terkait dengan pengelompokan vertikal yang menggambarkan adanya stratifikasi sosial, ekonomi, dan politik ini juga ditegaskan oleh Rajab (1996) secara lebih rinci yaitu bahwa ras kulit putih yaitu orang-orang Belanda atau bangsa Eropa lainnya meskipun tergolong sebagai kelompok minoritas tetapi merupakan kelompok elit pemegang kekuasaan yang menguasai berbagai sumber daya ekonomi dalam skala besar seperti, perkebunan, industri dan pertambangan. Kelompok kedua adalah orang-orang yang berasal dari ras Timur Asing yaitu bangsa Cina, Arab, dan India, yang juga termasuk ke dalam kelompok minoritas. Mereka memiliki mata pencaharian sebagai pedagang perantara tetapi tidak memiliki akses terhadap kekuasaan/pemerintahan dan mereka inilah yang disebut sebagai broker ekonomi karena perannya sebagai perantara antara pemerintah Hindia Belanda dengan golongan Pribumi terkait dengan kepentingan produksi dan distribusi ekonomi dengan pasar yang lebih luas. Sedangkan golongan Pribumi atau orang-orang Indonesia

merupakan kelompok ketiga yang secara horizontal ditandai oleh adanya berbagai perbedaan seperti perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, dan sifat-sifat kedaerahan. Golongan pribumi ini sumber mata pencahariannya bertumpu pada sektor pertanian, sebagian kecil juga sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pluralitas masyarakat Indonesia, begitu Nasikun (1984), Radjab (1996), dan Patji (2003), adalah pluralitas yang tidak mengarah pada (konsep) pembauran sehingga elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat itu berdiri sendiri-sendiri dan hanya merupakan kumpulan individu-individu. Jadi, bukan merupakan kesatuan politik yang didasarkan pada adanya kehendak bersama. Memang, begitu ditegaskan oleh Ruslani (2005), pluralitas agama, budaya, ras, bahasa, dan adat-istiadat yang seharusnya merupakan investasi yang sangat berharga terkait dengan konsep integrasi, sering kali dianggap sebagai kendala dalam menyatukan keinginan-keinginan untuk bersama. Akibatnya dapat saja muncul kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Ditambah lagi dengan kekerasan politik dan kebrutalan massa dengan mengatasnamakan agama sering kali terjadi karena ketidakmampuan untuk menghargai dan merasakan pentingnya kehadiran yang lain (*the other*) dalam kehidupan sosial. Terkait dengan hal ini, Derrida (dalam Ruslani, 2005) menyatakan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara gagasan mengenai etika universal dan kekerasan dengan yang lain (*the other*) itu. Baginya, upaya untuk mewujudkan suatu etika yang dilandasi oleh konsep universal justru akan meniadakan mereka yang berbeda (*otherness*) termasuk eksistensi perbedaan itu sendiri di dalam kehidupan sosial. Konsekuensinya, kekerasan muncul karena adanya cara pandang yang masih dikungkung oleh pemikiran yang *logosentris*. Ciri dari pemikiran yang *logosentris* adalah adanya upaya dari pihak penguasa untuk mengubah keragaman agama dan budaya menjadi kekuatan-kekuatan untuk mengatur dan menyatukan perbedaan sedemikian rupa sehingga dikuasai oleh nalar dogmatis yang menyatakan diri sebagai *Kebenaran Abadi*. Logosentrisme, begitu Ruslani (2005) menjelaskan, cenderung menutup diri untuk melihat eksistensi unsur-unsur historis, sosial, budaya, dan etnik masyarakat sehingga logosentrisme cenderung menjadi satu-satunya konsep yang harus dipanuti secara seragam dan memaksakan tindak peniruan buta. Parahnya, logosentrisme lebih mementingkan suatu konsep lahiriah yang dapat diproyeksikan di dalam ruang bahasa yang sangat terbatas, sesuai kaidah-kaidah bahasa, dan sangat tautologis, yaitu mengulang-ulang sesuatu yang (mengandung nilai-nilai) usang. Sedangkan wacana batiniyah yang konsepnya

melampaui batas-batas logosentris melalui kekayaan spiritual malah cenderung diabaikan.

Mengapa konsep 'logosentrisme' menjadi begitu berbahaya terhadap upaya-upaya persatuan atas dasar pluralisme?

B. PENELITIAN TERHADAP MASYARAKAT MULTIETNIK

Sebenarnya penelitian terhadap masyarakat multietnik merupakan penelitian yang sangat penting dan (barangkali sangat) diperlukan berkaitan dengan upaya-upaya untuk membantu pembangunan negara-negara multietnik dan upaya meredakan ketegangan-ketegangan dalam hubungan antar suku bangsa di dalam negara-negara multietnik yang sudah maju ekonominya. Menurut Koentjaraningrat (1988) dalam penelitian-penelitian dan survei-survei untuk membantu perencanaan program-program pengembangan hubungan baik dan toleransi antarsuku bangsa dalam suatu masyarakat multietnik maka di samping pendekatan ilmu-ilmu sosial pada umumnya, pendekatan sosiologi, antropologi, dan psikologi dapat sangat membantu implementasi dari program-program yang dicanangkan itu. Pentingnya konsep-konsep pendekatan dari ketiga ilmu sosial yang sangat mendasar itu terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan, dapat dilihat dari bibliografi mengenai kesukubangsaan dan integrasi nasional yang disusun oleh G.C. Bentley yang berjudul *Ethnicity and Nationality* yang diterbitkan tahun 1981. Dalam Referensi atau rujukan tersebut tercantum lebih dari 2300 judul karangan dan buku-buku mengenai masyarakat multietnik dari 125 negara di mana tulisan-tulisan itu mengkaji berbagai masalah multietnik dari sudut pandang antropologi, sosiologi, psikologi sosial, ekonomi, geografi, sejarah, linguistik, politik, dan secara lebih khusus membahas mengenai masalah masyarakat multietnik dalam kaitannya dengan demografi, migrasi, ekonomi, stratifikasi sosial, politik, identitas etnik, pendidikan, keluarga, kekerasan, kelompok sosial, sikap ideologi, kepercayaan, dan agama. Dalam kaitan ini, antropologi secara khusus dapat berperan dalam berbagai penelitian diakronik maupun sinkronik terkait dengan interaksi antara berbagai suku bangsa yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan berbagai metode observasi dan wawancara yang mendalam maupun dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur

kuat lemahnya sikap toleransi antarsuku bangsa di beberapa daerah dalam suatu negara. Contohnya adalah penelitian *National Unity Project* dari Northwestern University yang dilakukan di tujuh desa di Graha di bawah pimpinan ahli antropologi F. Hayward pada tahun 1972. Di samping itu, antropologi juga dapat berperan dalam penelitian-penelitian kuantitatif yang memfokuskan pada stereotip etnik yang dianut oleh warga dari suatu suku bangsa dan juga menyoroti bagaimana berbagai stereotip (etnik) itu berubah. Penelitian semacam itu pernah dilakukan oleh seorang guru besar antropologi sosial dari Universitas Indonesia, Soewarsih Warnaen, di mana ia melakukan penelitian itu dengan sampel murid-murid sebuah sekolah di Jakarta. Tetapi, penelitian seperti itu dapat juga dilaksanakan oleh seorang ahli antropologi yang mengambil sampelnya bukan dari kalangan murid-murid sekolah tetapi dari kalangan penduduk suatu kota, atau di suatu desa transmigrasi, ataupun di kalangan buruh-buruh di suatu pabrik atau perusahaan industri.

Erat kaitannya dengan kajian stereotip etnik, para ahli antropologi dan ahli psikologi sosial juga dapat meneliti munculnya identitas etnik melalui proses sosialisasi dan enkulturasi individu, ataupun melalui pendidikan formal di sekolah. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi sosial E.H. Erikson yang bekerja sama dengan ahli antropologi H.S. Mekeel dan A.L. Kroeber. Penelitian itu dilakukan pada masyarakat Indian Sioux di Negatra Bagian Dakota Selatan (South Dakota) di Amerika Serikat dan pada masyarakat Indian Yurok di lembah Sungai Klamath di California, juga di Amerika Serikat. Contoh lain mengenai penelitian yang menyangkut tumbuhnya identitas etnik (baik yang menyangkut bertahan atau berkurangnya identitas tersebut) terkait dengan identitas nasional adalah penelitian yang dilakukan oleh ahli antropologi wanita K. Verdery yang meneliti suku-suku bangsa Jerman, Hongaria, dan Rumania di desa Aural Vlacu (Bintinti) di Transylvania Barat Daya, Rumania. Suatu penelitian yang juga penting adalah penelitian mengenai identitas etnik yang berkaitan dengan identitas nasional dalam keadaan iridentisme, yaitu keadaan di mana suatu bagian dari sebuah suku bangsa menjadi warga dari negara lain. Hal seperti ini juga terjadi pada jaman penjajahan, ketika batas antara wilayah jajahan dibuat oleh para wakil negara penjajah di meja perundingan tanpa memiliki pengetahuan yang konkret mengenai keadaan sebenarnya. Kita mengetahui bahwa suku-suku bangsa di daerah-daerah perbatasan nasional seperti itu sudah menjadi sumber ketegangan, konflik dan peperangan antar negara. Di Belgia, misalnya, suku bangsa Jerman yang tinggal di daerah

Euphen-Malmedy dekat perbatasan Jerman Barat, sering kali menyebabkan hubungan yang tegang antara kedua negara, yaitu Jerman dan Belgia, sejak jaman Perang Dunia Pertama. Di Yugoslavia, suku bangsa Albania yang tinggal di daerah Kosovo dekat perbatasan negara Albania juga menyebabkan hubungan yang tegang dan sering kali menjadi konflik bersenjata antara kedua negara itu. Dan hal ini pula yang menimbulkan adanya gerakan Albania Islam di Kosovo yang ingin memisahkan diri dari Yugoslavia. Di India, suku bangsa Sikh yang tinggal di daerah Punjab dekat perbatasan Pakistan sering kali menyebabkan konflik antara India dan Pakistan dan semakin menambah persoalan di mana suku bangsa Sikh ingin mendirikan negara Sikh di Punjab yang terpisah dari India. Di Indonesia juga ada masalah iridentisme yaitu di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini (PNG) yang pernah menyebabkan hubungan antara Indonesia dan PNG menjadi tegang karenanya. Penelitian terhadap masalah-masalah iridentisme dengan pendekatan antropologis memang belum banyak dilakukan, begitu dikatakan oleh Koentjaraningrat (1988). Penelitian multietnik ini tentu akan sangat besar manfaatnya bila dilakukan dengan intensif dan mendalam karena hasil penelitian tersebut akan menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai masalah-masalah yang terkait dengan iridentisme dan sangat penting pula dalam rangka pertumbuhan kesatuan nasional yang sehat. Penelitian-penelitian lain mengenai hubungan atau interaksi antarsuku bangsa dalam masyarakat di suatu negara yang multietnik di mana penelitian itu tidak perlu dilaksanakan melalui penelitian lapangan tetapi memerlukan bantuan antropologi, adalah penelitian kuantitatif berdasarkan data statistik, untuk mengukur pengaruh naik turunnya frekuensi perjalanan dari suatu daerah etnik ke daerah etnik lainnya, perkawinan antaretnik, pengaruh media massa terhadap sikap dan pandangan orang atas kebudayaan suku-suku bangsa lain. Suatu penelitian media massa terhadap meningkatnya kepercayaan orang Prancis terhadap ideologi nasionalnya dan melemahnya sikap kedaerahan mereka, pernah dilakukan oleh C. Guillamin pada tahun 1971.

Mengapa penelitian multietnik dianggap penting dalam kaitannya dengan upaya integrasi berdasarkan pluralitas budaya?

C. SEKILAS TENTANG PERISTIWA-PERISTIWA KONFLIK

Konsep primordialisme, seperti telah dijelaskan di atas, memang memiliki sifat *ekuilibrium*, yaitu yang menggambarkan keseimbangan. Tetapi, dalam implementasinya, sifat *equilibrium* dari konsep primordialisme cenderung memunculkan unsur-unsur yang negatif, dan ini sering kali terjadi pada banyak kasus konflik antar kelompok masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini, jika dicermati, disebabkan oleh adanya penonjolan yang dilebih-lebihkan terkait dengan faktor subjektivitas dari masing-masing elemen masyarakat seperti unsur-unsur keagamaan, unsur sosial, unsur politik, dan ciri-ciri etnis atau ke-sukubangsa-an. Sementara faktor-faktor yang bersifat objektif, yaitu kenyataan sebagai masyarakat yang pluralistik, begitu Patji (2001) menjelaskan, cenderung ditutup-tutupi dengan alasan yang tidak jelas, hanya karena adanya berbagai kepentingan politis yang menonjolkan ke-*eka*-annya dibanding dengan ke-*bhineka*-annya.

Banyak peristiwa kerusuhan yang melibatkan masyarakat dalam skala luas, yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Lihat saja peristiwa yang terjadi di Aceh, Riau, Kalimantan Barat (konflik etnik di Singkawang dan Sambas), Banjarmasin, Jakarta, Tasikmalaya, Banyumas, Pekalongan Solo, Situbondo, Madura, Banyuwangi, Denpasar, Kupang, Maluku, Ambon, Makasar, dan Papua. Sebagian dari konflik tersebut, yang tidak berlatar belakang etnik atau agama, seperti di Jakarta, Tasikmalaya, Solo, Situbondo, Banjarmasin, dan Madura, dengan segera mudah diakhiri karena kerusuhan itu *hanya* merupakan reaksi-reaksi atas ketidakadilan dan kesenjangan sosial maupun ekonomi. Kerusuhan di Solo dan Denpasar meskipun banyak menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit, namun dapat dengan mudah pula diselesaikan. Kemudian juga peristiwa di Makasar yang merupakan unjuk rasa mahasiswa Makasar dianggap sebagai letupan ketidakpuasan atas kondisi sosial politik yang sedang berjalan yaitu atas proses demokratisasi yang dianggap melenceng dari apa yang dicita-citakan semula. Hanya saja pada unjuk ketidakpuasan mahasiswa Makasar itu sempat diikrarkan untuk mendirikan negara Sulawesi atau Negara Indonesia Timur Raya (Patji, 2001), meskipun ikrar itu tidak mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat di sana. Akan halnya peristiwa-peristiwa dengan latar belakang separatisme atau konflik etnik atau yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan antar etnik dan agama ternyata masih ada yang berlangsung terus sampai sekarang. Lihat saja peristiwa Ambon dan

Palu yang belum dapat dihentikan sampai sekarang. Juga, konflik bersenjata di Aceh, di mana kelompok Aceh Merdeka ingin memisahkan diri dari NKRI, atau gerakan separatisme yang dilakukan OPM di Papua. Peristiwa-peristiwa yang belum tertangani secara tuntas dan masih terus berlangsung sampai sekarang ini terutama disebabkan oleh persoalan-persoalan etnik dan agama. Berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang kemudian justru berlanjut menjadi besar karena dikait-kaitkan dengan persoalan yang dianggap sangat sensitif, yaitu masalah SARA. Namun ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh daerah (propinsi) tertentu yang berangkat dari persoalan-persoalan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini adalah masalah ketidakpuasan dan merasa mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat terhadap daerah, di mana pemerintah pusat tidak aspiratif terhadap keinginan daerah. Jadi, selain masalah SARA juga ada masalah-masalah yang menyangkut kesenjangan sosial-ekonomi dan sosial-politik antara pusat dan daerah.

Munculnya sikap primordialistik pada kelompok-kelompok suku bangsa ketika berinteraksi dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya *pertama* adanya krisis kebudayaan. Memang, krisis ini pada awalnya bermula dari krisis moneter, yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, lalu merembet kepada krisis politik, dan meluas menjadi krisis kepercayaan. Krisis kebudayaan ini pada dasarnya merupakan krisis sistem acuan bagi masyarakat dalam bertindak dan berperilaku dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, dan bidang ekonomi. Sistem acuan ini berupa nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan, solidaritas, nilai-nilai kemanusiaan, dsb. Yang berfungsi sebagai simpul ikatan kebersamaan. Tidak berfungsinya sistem acuan itu pada dasarnya adanya hal-hal seperti, adanya perlakuan diskriminatif yang dilakukan penguasa terhadap masyarakat di mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak lagi berpihak terhadap rasa keadilan masyarakat yang pluralistik sehingga menimbulkan perasaan tidak respek atau kurang menghormati kepada pemerintah yang dianggap tidak berlaku adil. Lebih jauh, hal ini menimbulkan perasaan curiga terhadap kelompok lain yang dianggap sebagai *anak emas* oleh pemerintah. Keadaan tersebut dapat terjadi karena ada beberapa kelemahan dalam mengelola kebutuhan masyarakat, di antaranya *pertama* dicanangkannya slogan-slogan *demi kepentingan bersama*, atau *demi kepentingan negara dan bangsa*, atau *untuk kemajuan rakyat*, yang kesemuanya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan. *Kedua*, adalah adanya upaya pemerintah dalam menyusun rencana-rencana dan kebijakannya dengan memosisikan diri sebagai perumus semua rencana kebutuhan seolah-olah pemerintah mengetahui betul semua kebutuhan rakyat, dengan alasan akan memberikan nilai tambah bagi rakyat, padahal justru hal yang dirumuskan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak memperhitungkan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas. *Ketiga*, pemerintah selalu berperan dalam menentukan atau mengambil keputusan sehingga terkesan terlalu memaksakan kehendaknya. Akibatnya pintu konsensus menjadi tertutup, musyawarah menjadi buntu karena pemerintah selalu *berinisiatif* untuk menentukan kebijakan secara sepihak. Meskipun ada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun fungsi DPR seolah mandul karena lembaga tersebut lebih banyak berpihak kepada pemerintah (ini terjadi pada jaman Orde Baru) dan lebih sering memperjuangkan kepentingannya sendiri atau kepentingan golongan/partainya (dan ini terjadi pada masa reformasi). Dalam konteks ini, Nasikun (1984) menjelaskan, bahwa manakala mekanisme konsensus tidak berkembang atau penguasa tidak membuka saluran konsensus maka hal itu akan mengakibatkan timbulnya pemaksaan (koersif) terhadap upaya-upaya integrasi di mana pemaksaan ini akan sangat rentan terhadap terciptanya konflik sosial terbuka dan berskala luas. Konflik sendiri merupakan lahan untuk tumbuhnya sikap primordialistik karena secara sosio-kultural di dalamnya telah ada benih-benih perbedaan dan persaingan antar kelompok/golongan. Memang, sisi negatif dari suatu pembangunan adalah timbulnya persaingan dan konflik dan hal ini ditegaskan oleh Laurer (1989) bahwa sebenarnya terciptanya struktur-struktur masyarakat disebabkan oleh adanya kekuatan-kekuatan antagonistik, yaitu kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dan berlawanan yang akan mengakibatkan perubahan-perubahan struktur secara sinambung. Ini memang hukum yang universal, yang berlaku dalam setiap masyarakat di seluruh dunia di mana perubahan itu berawal dari tahapan primordial yang paling sederhana hingga ke tingkatan yang paling kompleks yang secara konkret merupakan pelanggaran oleh suatu masyarakat terhadap masyarakat lainnya atas hak dan wilayah kelompok yang bersangkutan. Secara hakiki, adanya pelanggaran artinya ada interaksi antara kelompok-kelompok yang eksis di dalam kehidupan sosial, dan ini merupakan pemicu dari adanya perubahan dan pembaharuan yang terjadi. Memang ada kemungkinan di dalam interaksi seperti itu akan terjadi konflik, bahkan konflik yang meluas dan berkepanjangan. Justru di sinilah

peran pemerintah, peran negara, dalam mengakomodasi kepentingan rakyat di mana pemerintah harus menjadi *mediator* dalam berbagai penyelesaian konflik dengan mengemukakan nilai-nilai atau upaya-upaya persuasif dan menanamkan nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan tanpa dibarengi tindakan-tindakan koersif. Barangkali yang harus menjadi perhatian adalah suatu *integrative revolution* (Geertz, 1973) yaitu suatu upaya integrasi sosial (masyarakat) ke dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas yang dapat menunjang pemerintahan nasional. Hal ini sesungguhnya untuk meredam potensi meletupnya konflik dan disintegrasi politik yang diakibatkan oleh SARA (Amal dan Armawi, 1998). Atas hal ini barangkali apa yang dikemukakan oleh Geertz (1973) bahwa perbedaan-perbedaan pluralitas masyarakat Indonesia yang merupakan cikal-bakal timbulnya sentimen primordial yang menghambat upaya-upaya penyatuan dan kesatuan, dapat ditepis.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dapatkah Anda menjelaskan mengapa banyak suku-suku bangsa yang ingin memisahkan diri dari negaranya?
- 2) Dapatkah Anda menjelaskan mengenai masyarakat multietnik yang dilihat dari sudut pandang vertikal dan horizontal?
- 3) Termasuk tipe masyarakat manakah (atau beberapakah) masyarakat Indonesia bila mengikuti konsepnya Koentjaraningrat? Jelaskan secara singkat.
- 4) Dapatkah Anda menjelaskan mengenai karakteristik masyarakat multietnik seperti yang dikemukakan Van Den Berghe?
- 5) Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep logosentrisme.

Petunjuk Jawaban latihan

- 1) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dianjurkan untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai:
 - a) keragaman masyarakat multietnik;
 - b) tipe-tipe masyarakat multietnik.

- 2) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dianjurkan untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai:
 - a) keragaman masyarakat multietnik dari sudut pandang vertikal;
 - b) keragaman masyarakat multietnik dari sudut pandang horizontal;
 - c) perbedaan konsep vertikal dan horizontal terkait dengan multietnik.

- 3) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dianjurkan untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai:
 - a) keragaman masyarakat multietnik;
 - b) tipe-tipe masyarakat multietnik.
 - c) Tipe kedelapan masyarakat multietnik

- 4) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dianjurkan untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai:
 - a) keragaman masyarakat multietnik;
 - b) tipe-tipe masyarakat multietnik;
 - c) karakteristik masyarakat multietnik menurut Van Den Berghe.

- 5) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dianjurkan untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai:
 - a) keragaman masyarakat multietnik;
 - b) tipe-tipe masyarakat multietnik;
 - c) konsep logosentrisme seperti yang dikemukakan oleh Ruslani.



Pluralisme atau kemajemukan suatu masyarakat itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Masyarakat secara horizontal dilihat dari kenyataan yang menunjukkan adanya satuan-satuan sosial yang keragamannya dicirikan oleh

perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat atau tradisi, serta unsur-unsur kedaerahan lainnya. Sedangkan mengelompokkan vertikal umumnya digambarkan dengan adanya stratifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Menurut pandangan fungsionalisme struktural, di dalam masyarakat pluralitas, menganggap bahwa semua disfungsi, semua ketegangan, dan berbagai penyimpangan sosial mengakibatkan terjadinya perubahan sosial berupa timbulnya diferensiasi sosial yang semakin kompleks, dan itu merupakan akibat dari pengaruh faktor-faktor yang datang dari luar. Pluralitas agama, budaya, ras, bahasa, dan adat-istiadat yang seharusnya merupakan investasi yang sangat berharga terkait dengan konsep integrasi, sering kali dianggap sebagai kendala dalam menyatukan keinginan-keinginan untuk bersama. Upaya integrasi dengan mewujudkan suatu etika yang dilandasi oleh konsep universal justru meniadakan mereka yang berbeda (*otherness*) di dalam kehidupan sosial. Kekerasan juga muncul karena adanya cara pandang yang masih dikungkung oleh pemikiran yang *logosentris*, di mana pihak penguasa berupaya mengubah keragaman agama dan budaya menjadi kekuatan-kekuatan untuk mengatur dan menyatukan perbedaan sedemikian rupa sehingga dikuasai oleh nalar dogmatis. Parahnya, logosentrisme cenderung menutup diri dalam melihat eksistensi unsur-unsur historis, sosial, budaya, dan etnik masyarakat sehingga ia cenderung menjadi satu-satunya konsep lahiriah yang harus dipatuhi padahal ia mengabaikan aspek-aspek spiritual. Konsep primordialisme, memang memiliki sifat *equilibrium*, tetapi, dalam implementasinya, ia cenderung memunculkan unsur-unsur yang negatif, dan ini sering kali terjadi pada banyak kasus konflik antar kelompok masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini, jika dicermati, disebabkan oleh adanya penonjolan yang dilebih-lebihkan terkait dengan faktor subjektivitas dari masing-masing elemen masyarakat seperti unsur-unsur keagamaan, unsur sosial, unsur politik, dan ciri-ciri etnis atau ke-sukubangsaan. Sementara faktor-faktor yang bersifat objektif, yaitu kenyataan sebagai masyarakat yang pluralistik, cenderung ditutup-tutupi karena adanya berbagai kepentingan politis yang menonjolkan ke-*eka*-annya dibanding dengan ke-*bhinneka*-annya. Atas hal ini, konflik dapat terjadi karena tumbuhnya sikap primordialistik yang secara sosio-kultural di dalamnya telah ada benih-benih perbedaan dan persaingan antar kelompok/golongan. Di sinilah peran pemerintah, peran negara, dalam mengakomodasi kepentingan rakyat di mana pemerintah harus menjadi *mediator* dalam berbagai penyelesaian konflik dengan mengemukakan atau upaya-upaya persuasif dan menanamkan nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan tanpa dibarengi tindakan-tindakan koersif atau represif.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kesulitan dalam menjaga keamanan negara yang terdiri dari masyarakat multietnik, pada dasarnya disebabkan oleh adanya
 - A. homogenitas struktur masyarakat
 - B. heterogenitas struktur masyarakat
 - C. otonomi khusus yang diminta daerah tertentu
 - D. status istimewa pada propinsi-propinsi tertentu

- 2) Ciri-ciri negara pada tipe kedua, seperti negara Selandia Baru, adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - A. ditinggali oleh keturunan imigran asal Eropa
 - B. kebudayaan dan bahasa nasional adalah milik para imigran
 - C. penduduk pribumi dianggap sama tinggi derajatnya dengan migran Eropa
 - D. para pendatang yang bukan bangsa Eropa dianggap penduduk kelas dua

- 3) Pluralisme, dilihat dari sudut pandang horizontal, mencakup unsur-unsur di bawah ini, *kecuali* adanya perbedaan
 - A. suku bangsa
 - B. adat istiadat
 - C. agama/kepercayaan
 - D. mata pencaharian masyarakat

- 4) Konsep masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua elemen atau lebih tetapi tidak dapat membaur dan bersatu. Konsep tersebut dikemukakan oleh
 - A. Nasikun
 - B. Furnivall
 - C. Van Den Berghe
 - D. Koentjaraningrat

- 5) Konflik adalah suatu jejak sosial yang terdapat di dalam kehidupan sosial dengan pola-pola dan intesitasnya sendiri-sendiri. Hal itu dikemukakan oleh
 - A. Nasikun
 - B. Furnivall

- C. van den Berghe
 - D. Koentjaraningrat
- 6) Pendekatan fungsionalisme struktural pada dasarnya melihat masyarakat sebagai suatu proses yang bergerak ke arah konsep yang bersifat
- A. tertutup
 - B. seimbang
 - C. homogen
 - D. heterogen
- 7) Pluralisme di jaman Hindia-Belanda menunjukkan bahwa golongan pribumi termasuk ke dalam
- A. broker ekonomi
 - B. kelompok minoritas
 - C. kelompok mayoritas
 - D. kelompok dengan perbedaan horizontal
- 8) Suku bangsa Jerman yang tinggal di daerah Malmady seringkali memicu ketegangan antara negara Jerman dengan negara
- A. Belgia
 - B. Kosovo
 - C. Albania
 - D. Rumania
- 9) Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, dipicu oleh kelompok yang ingin memisahkan diri dari India, yaitu suku bangsa
- A. Sikh
 - B. Punjab
 - C. Pakistan
 - D. Islam Kosovo
- 10) Bahwa pluralitas masyarakat Indonesia itu dapat memicu timbulnya sentimen primordial yang dapat menghambat upaya-upaya penyatuan nasional, dikemukakan oleh
- A. Geertz
 - B. Laurell
 - C. Nasikun
 - D. Furnivall

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Menelusuri Pengalaman Empirik Bangsa Indonesia

A. PLURALITAS MASYARAKAT

Adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari kolektivitas kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk. Dari segi etnisitas, terdapat 656 suku bangsa dengan tidak kurang dari 300 jenis bahasa-bahasa lokal (daerah), di Papua saja lebih dari 200 bahasa-bahasa suku bangsa. Menurut Geertz (1967) berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dengan bahasa dan identitas budaya yang berbeda-beda satu sama lain itu terdapat 35 suku bangsa yang besar dan masing-masing suku bangsa itu memiliki bahasa dan adat-istiadat yang tidak sama, di antaranya suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Bugis, Bali, Batak, Sumbawa, Betawi, Aceh, Palembang, Sasak, Banjar, Makasar, Toraja, Papua, dll. Skinner sendiri menggolongkan orang-orang Tionghoa, sebagai salah satu suku bangsa di antara berbagai suku bangsa di Indonesia karena kedudukannya yang sangat kuat dalam bidang ekonomi dan sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan suku-suku bangsa lain (Nasikun, 1984). Wilayah lingkungan utama kehidupan juga memperlihatkan variasi yang berbeda-beda. Ada komunitas yang mengandalkan pada laut sebagai sumber kehidupannya seperti orang-orang Bajo. Orang-orang Bugis-Makassar, Bawean dan Melayu dikenal sebagai masyarakat pesisir, serta terdapat pula komunitas-komunitas pedalaman, antara lain orang Gayo di Aceh, Dayak di Kalimantan, Tengger di Jawa Timur, Toraja di Sulawesi Selatan, Dani di Papua, dsb. Karakter pluralistik itu ditambah pula dengan perbedaan-perbedaan tipe masyarakat yang dikemukakan oleh Geertz (dalam Patji, 2001) misalnya bahwa ia pernah melakukan klasifikasi (yang juga masih berlaku sampai sekarang) di mana sebagian masyarakat itu tergolong sebagai komunitas kosmopolitan perkotaan, yang merupakan golongan terbesar komunitas peralihan dari pertanian ke industri, dan sebagian masyarakat masih mencirikan komunitas yang berbudaya suku bangsa (*tribal communication*).

Geertz (1967) memperkirakan lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia dengan bahasa dan identitas budaya yang berbeda-beda satu sama

lain. Tetapi kemajemukan itu tidak menghalangi keinginan untuk bersatu. Beberapa rekaman sejarah memperlihatkan hal itu, misalnya diikrarkannya *Sumpah Pemuda* pada tahun 1928 yang menegaskan membangun tekad nasionalisme baru yaitu nasionalisme Indonesia. Sumpah yang diikrarkan itu merupakan tekad untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Dan ketika merdeka dipilih bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Kedua peristiwa bersejarah itu menunjukkan suatu kebutuhan yang secara sosio-politis merefleksikan watak atau karakteristik pluralitas. Kenyataan sejarah dan sosial budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui arti simbol *Bhinneka Tunggal Ika*, yang maknanya adalah pluralitas di dalam kesatuan. Oleh karenanya, pluralitas masyarakat bangsa Indonesia sebagai suatu realitas sosial budaya dan realitas sejarah harus dilihat sebagai sesuatu yang seimbang, dalam arti bahwa semua konsep, semua wacana, dan semua realitas mengenai pluralitas suku-suku bangsa itu ditempatkan pada tingkatan yang sederajat. Di sini, kompleksitas permasalahan kesukubangsaan tidak direfleksikan oleh besarnya warga komunitas, tetapi lebih memfokuskan pada substansi masalah yang dihadapi dalam rangka menegakkan perasaan kebangsaan dan semangat persatuan. Dengan demikian, tidaklah relevan apabila upaya-upaya untuk memahami bangsa Indonesia itu dapat dilakukan melalui telaah suku-suku bangsa yang ada di dalamnya. Hal ini sama saja dengan mengukur keberhasilan pembangunan (fisik) secara nasional dengan melihat (keberhasilan) pembangunan di pusat atau di Jakarta. Apabila hal itu dilakukan maka upaya tersebut merupakan pengingkaran terhadap kemajemukan sosio-kultural yang dimiliki bangsa Indonesia.

Sebagai negara yang berbentuk kepulauan (terbesar di dunia) dengan gugusan lebih dari 17.000 pulau-pulau besar dan kecil, Indonesia memiliki keragaman budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa daerah yang tersebar wilayah Indonesia yang merupakan ciri dari sifat kemajemukan masyarakat Indonesia. Terkait dengan hal ini maka North (dalam Mutakin, 2003) membedakan tiga jenis kemajemukan, yaitu *pertama* apa yang disebut dengan *rank differentiation* (diferensiasi tingkatan), diferensiasi ini muncul akibat adanya ketimpangan yang menyangkut distribusi barang-barang yang dibutuhkan karena persediaan terbatas. Hanya mereka yang memiliki pendapatan tinggi sajalah yang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. Diferensiasi tingkatan ini cenderung merujuk kepada kemajemukan yang bersifat ekonomis atau kemajemukan

yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial. Mereka yang memiliki status sosial tinggi sajalah yang dapat menguasai semua sektor kehidupan. Tingkatan (*status*) sosial dimaksud mencakup:

1. perbedaan kepemilikan kekayaan yang menciptakan kelas-kelas. Kelas atas adalah mereka yang hidup dari kekayaannya, sedangkan kelas bawah adalah mereka yang memiliki kekayaan sangat terbatas atau bahkan tidak memiliki kekayaan sama sekali dan bahkan dirinya menjadi milik orang lain karena ia hanya memiliki tenaga (untuk) kerja belaka (Lihat kembali konsepnya Marx dalam Modul Teori Sosiologi Klasik).
2. tingkatan yang didasarkan pada kekuatan ekonomi yang menciptakan kelas-kelas pendapatan, seperti kelas atas yaitu para bankir dan para pemodal, serta kelas bawah yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh-buruh perusahaan.
3. kelas-kelas sosial yang tercipta karena pendidikan dan dengan pendidikannya itu mereka menjadi kaya. Kelas-kelas sosial di sini merujuk kepada berbagai posisi antarindividu yang karena pendidikan dan kekayaannya bebas beraktivitas selama hidupnya melebihi satu generasi. Kelas-kelas atas adalah mereka yang memiliki kekayaan dan pendidikan tinggi, sedangkan kelas bawah adalah mereka yang tidak memiliki persyaratan seperti yang dimiliki oleh kelas atas.
4. adanya tingkatan status sosial di mana kelas atas adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi, posisi tinggi dengan gengsi sosial yang tinggi, dan dengan gaya hidup yang paling banyak diterima oleh masyarakat. Di sini, anak-anak keturunan mereka juga akan memiliki status sosial tinggi karena mengikuti status sosial orang tua mereka.

Perbedaan berdasar tingkatan sosial tersebut, menciptakan kemajemukan dalam kelas sosial di mana kemajemukan ini hampir mirip dengan stratifikasi sosial yang menggambarkan kompleksitas struktur sosial masyarakat dan menciptakan kelas-kelas sosial. *Kedua*, adalah *functional differentiation* atau diferensiasi fungsional. Diferensiasi ini pada umumnya merujuk kepada pembagian kerja di mana pada awalnya pembagian kerja ini didasarkan pada jenis kelamin. Namun, karena semakin kompleksnya struktur masyarakat maka pembagian kerja itu didasarkan pada keterampilan, keahlian, pendidikan, dan juga pada kedudukan sosial. Pembagian kerja yang berdasar

pada kedudukan sosial ini biasanya pembagian kerja yang terdapat pada suatu institusi atau lembaga yang banyak mempekerjakan orang-orang. Posisi orang-orang di dalam organisasi, (ini digambarkan di dalam struktur organisasinya), biasanya didasarkan pada keahlian, pendidikan, atau pada perbedaan fungsi dan peran masing-masing individu. Perbedaan (posisi) inilah yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya perbedaan dalam pendapatan yang diterima, meskipun ada juga kedudukan atau posisi yang sama tetapi peran dan fungsinya tetap berbeda, seperti seorang sekretaris dan bendahara yang memiliki kedudukan sama (di dalam suatu struktur organisasi) tetapi fungsi kedua kedudukan itu berbeda. Sedangkan yang *ketiga*, adalah *custom differentiation* atau diferensiasi adat yang merujuk kepada berbagai aturan atau kaidah yang digunakan sebagai patokan dalam bertindak dan berperilaku di dalam kehidupan sosial. Aturan atau kaidah ini merupakan patokan seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan waktu dan tempat di mana ia beraktivitas. Aturan-aturan ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya, setiap masyarakat akan memiliki aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu bagi anggotanya di mana aturan dan kaidah itu tidak berlaku sama pada masyarakat lainnya. Mutakin dan Pasya (2003) berpendapat bahwa diferensiasi sosial-lah yang dianggap sebagai konsep yang bersifat universal di dalam organisasi sosial yang ada di dunia ini.

Terkait dengan keanekaragaman ras masyarakat Indonesia, Mutakin dan Pasya (2003) menjelaskan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia purba telah ada sejak jaman glasial (jaman es). Kemudian datang gelombang migrasi dari utara dengan ciri-ciri Mongoloid. Oleh karenanya manusia Indonesia purba yang memiliki ciri-ciri sebagai ras Mongoloid diperkirakan datang dari utara atau dari daratan Cina di Propinsi Yunan. Gelombang migrasi dari utara ini terus berlanjut dan mereka yang bermigrasi ini membawa serta kebudayaan mereka sejak jaman batu sampai jaman logam dan mengembangkannya di tempat tinggal yang baru, termasuk teknologi bertani mulai pertanian lahan kering (ladang atau hortikultura) sampai dengan pertanian sawah dengan teknologi pengairan. Mereka inilah yang akhirnya menjadi penduduk kepulauan Indonesia dengan ciri-ciri Mongoloid, dan disebut sebagai Mongoloid luar, karena apa yang mereka bawa saat migrasi itu sudah tidak utuh lagi seperti saat awal mereka datang disebabkan telah melalui proses adaptasi dan proses evolusi. Pada jaman kerajaan, karena adanya hubungan dagang dan penyebaran agama, pembauran dengan cara perkawinan dengan

(suku) bangsa lain menyebabkan terjadinya percampuran ras. Di Indonesia terdapat ras Mongoloid dan ras Kaukasoid Eropa di mana perbedaan ras ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri ras yang majemuk meskipun ciri-ciri yang menjadi batas perbedaan pemisah ras itu sendiri sudah kabur dan tidak jelas lagi karena adanya proses asimilasi yang telah berlangsung berabad-abad. Bila merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang atau bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan melalui undang-undang, ini artinya bahwa bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang nenek moyangnya telah ada di Indonesia sejak dahulu kala yang ada di wilayah Indonesia. Sedangkan bangsa lain di sini, seperti peranakan Belanda, Cina, atau Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada NKRI dan disahkan melalui undang-undang. Selain itu ada juga keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, di mana setiap suku bangsa ini memiliki ciri-ciri tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dengan daerah tempat suku-suku bangsa itu berasal, hal ini terlihat dari *pertama* bahwa setiap suku bangsa itu memiliki budayanya sendiri dan akan mengembangkan budayanya serta akan mempertahankan budayanya dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada budayanya itu; *kedua*, bahwa kesadaran akan adanya kesamaan nilai-nilai budaya sendiri dengan nilai-nilai budaya suku bangsa lain akan memupuk rasa kebersamaan antarsuku bangsa dan tetap pengembangan budaya suku bangsanya sendiri; *ketiga*, setiap suku bangsa itu akan membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan diterapkan atau diwujudkan dengan menggunakan bahasa daerah yang dimilikinya; *keempat*, membentuk ciri dan identitas kelompok sendiri, seperti bahasan, sistem kekerabatan, pakaian, sistem kepercayaan, bentuk rumah, dsb. agar diterima oleh kelompok lain.

Menurut Geertz (1981), konsep kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia itu sesungguhnya menggambarkan perbedaan dalam hal hubungan kekerabatan, ras, daerah asal, bahasa, dan agama. Hubungan kekerabatan, seperti yang dikemukakan oleh Geertz itu (1967), merupakan gambaran yang sangat kental yang terdapat di dalam masyarakat di negara-negara berkembang, di mana hubungan kekerabatan ini merupakan ikatan (kekerabatan) atas dasar hubungan darah/keturunan (genealogis) yang dapat ditelusuri berdasar garis keturunan ayah, ibu, atau keduanya. Hubungan kekerabatan akan menjadi lebih berarti manakala dihubungkan dengan

berbagai segi kehidupan yang akan membawa aspek-aspek budaya, agama, politik, atau keanggotaan suatu klan sehingga hubungan antaranggota dan kedudukan di dalam organisasi sosial dilihat berdasarkan ikatan kekerabatan yang dimiliki. Selanjutnya, Geertz (1967) juga menyatakan bahwa ras adalah salah satu faktor dari kemajemukan suatu bangsa di mana ras ini merupakan ciri fisik, seperti warna kulit, warna rambut, postur tubuh, dan sebagainya, yang dimiliki seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Hal lain yang merupakan karakteristik kemajemukan adalah daerah asal tempat seseorang itu dilahirkan. Daerah asal ini akan memberikan ciri pada seseorang manakala ia berada di tempat (daerah) lain di mana hal ini merujuk kepada dialek atau aksen bahasa yang digunakan, adanya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, ada organisasi kedaerahan yang muncul di daerah lain, seperti Ikatan Mahasiswa Sunda di Yogyakarta atau Ikatan Mahasiswa Surabaya di Bandung, dsb. Selain itu, ada faktor bahasa, di mana faktor ini juga merujuk kepada adanya perbedaan dan keanekaragaman karena beragamnya bahasa daerah yang ada. Terakhir adalah agama, di sini agama merupakan salah satu referensi dari adanya keragaman yang ada. Hal ini karena agama dianut oleh individu-individu dan individu-individu itu menganut agama yang berbeda berdasar keyakinan individu yang bersangkutan. Perbedaan ini memang dilatarbelakangi oleh sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Ada daerah yang pemeluk agama tertentu merupakan agama yang dianut atau dipeluk oleh mayoritas penduduknya, tetapi di daerah lain agama tersebut merupakan agama minoritas karena hanya dipeluk atau dianut oleh sebagian kecil saja penduduk daerah tersebut.

Setiap suku bangsa akan sangat tergantung kepada eksistensi suku-suku bangsa lain sehingga hubungan dengan suku-suku bangsa lain itu dapat berkembang dan terjaga eksistensi budayanya. Atas hal ini, mereka dapat saling melengkapi, saling beradaptasi, dan dapat saling menerima nilai-nilai budaya dari suku-suku bangsa lainnya tanpa merubah identitas atau karakteristik budaya suku bangsa sendiri. Keanekaragaman budaya inilah yang dimiliki Indonesia, di satu pihak memang keragaman ini dapat mempererat integrasi di antara mereka karena adanya persamaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tetapi, di lain pihak, unsur-unsur yang bertentangan dapat pula mengakibatkan konflik di antara mereka. Satu kenyataan bahwa di kota-kota besar ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki berbagai bangsa menjadi pudar karena pengaruh industrial, dan perubahan itu

sesungguhnya merupakan perubahan dari bentuk lama ke bentuk yang baru, yaitu dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, bila orientasi masyarakat itu awalnya pada bidang agraris. Perubahan itu memang tak dapat dihindarkan karena anggota-anggota suku-suku bangsa itu juga ikut berperan di dalam konsep perubahan dimaksud. Kemudian, seperti telah dijelaskan di atas, agama juga merupakan salah satu faktor terciptanya keragaman suku-suku bangsa di Indonesia. Bila menelusuri perkembangan sejarah maka perkembangan (masuknya) agama-agama di Indonesia maka perkembangan itu terlihat dari masuknya berbagai budaya asing, seperti budaya India, masuknya budaya Islam dengan budayanya, masuknya para misionaris Kristen dan Katolik, serta juga penyebaran agama-agama lain tidak lepas dari perkembangan budaya dan agama-agama di Indonesia.

Geertz (1963) yang setuju dengan konsep masyarakat majemuk yang diajukkan Furnivall memang melihat bahwa kemajemukan atau pluralitas masyarakat Indonesia yang terbentuk sejak jaman Hindia Belanda, ternyata masih terbawa sampai masa pasca kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, ia melihat bahwa pluralisme itu tidak lagi bersifat vertikal, karena adanya perubahan situasi politik yang juga telah berubah. Dalam pandangannya itu, kekuatan politik kolonial yang begitu *concern* dalam menjaga *status-quo* pluralitas masyarakat Indonesia atas dasar perbedaan, aksesibilitas, dan kontrol atas kekuasaan politik dan ekonomi, telah berantakan bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II. Sejak kemerdekaan Indonesia itulah, negara dan bangsa Indonesia lalu dihadapkan pada pluralisme Horizontal (Radjab, 1996). Di mana atas hal ini mengelompokkan masyarakat Indonesia lebih banyak diikat oleh ikatan-ikatan primordial, seperti ikatan kekerabatan, ras, bahasa, agama, dan suku bangsa (Lihat tulisan Clifford Geertz dalam *Old Societies and New Nations*, 1963). Ikatan primordial inilah, begitu Radjab (1966) menjelaskan, yang merupakan pengikat asli masyarakat Indonesia dan atas dasar itulah mengelompokkan masyarakat Indonesia itu tumbuh dan berkembang baik dalam organisasi-organisasi sosial formal maupun informal, dalam pemerintahan, dalam organisasi-organisasi ekonomi, maupun dalam organisasi-organisasi politik. Menurut Geertz (1981), memang ikatan primordial itu, khususnya primordialisme horizontal, memiliki potensi konflik yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa karena, mengelompokkan berdasar ikatan primordial ini, lanjut Geertz, sangat menyulitkan komunikasi, pembauran antar golongan karena masing-masing

kelompok akan menggunakan kerangka budaya mereka sendiri dalam berkomunikasi.

Menurut Patji (2001, dalam *Indonesia Menapak Abad 21*) yang harus dipahami dari karakteristik pluralitas masyarakat Indonesia adalah keanekaragaman suku-suku bangsa dan kebudayaan yang ada. Konsep ini kemudian juga mencakup keragaman stratifikasi sosial, struktur sosial, kelas atau golongan sosial, cara bertahan hidup, orientasi nilai-nilai sosial budaya, konsep-konsep dan praktek-praktek menegakkan hukum, norma-norma dan kaidah-kaidah moral, partisipasi masyarakat di bidang politik, dsb. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan dilaksanakan atas dasar keadilan. Artinya, pembangunan itu tidak saja mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk suatu wilayah melainkan juga harus memperhitungkan potensi alam yang dimiliki, tingkat kesejahteraan hidup warganya, akses terhadap sumber daya, dan sebagainya. Semua keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu, memang terkait dengan konsep integrasi dan konflik, di mana keragaman itu, menurut Geertz (1963), merupakan kendala yang sangat krusial dalam mencapai integrasi nasional. Oleh karenanya, konflik haruslah diarahkan dan diupayakan menjadi suatu perbedaan yang wajar karena pada dasarnya masyarakat itu memiliki konsep gagasan masing-masing mengenai pembangunan dan modernisasi. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat majemuk, menurut Mutakin dan Pasya (2003), tidak harus dianggap sebagai suatu pertentangan yang mengarah kepada perpecahan melainkan harus dianggap sebagai perbedaan-perbedaan yang muncul sebagai akibat adanya ikatan primordial¹. Atas hal ini harus dicari titik temu dan solusi, sehingga pluralitas itu dapat digunakan untuk mewujudkan suatu integrasi. Dengan integrasi itu pula haruslah dibuat konsensus bersama mengenai norma-norma, kaidah-kaidah

¹ *Primordial sentiment* (perasaan atau rasa primordial) merupakan unsur-unsur utama di dalam proses integrasi yang dilakukan melalui kelompok-kelompok primordial. Kelompok primordial adalah merupakan unit sosial yang hubungan antar anggotanya didasari oleh ikatan primordial, yaitu memiliki hubungan yang alami yang bersifat timbal-balik antarsesama anggota baik atas dasar hubungan darah (genealogis) atau hubungan adat yang bersifat kedaerahan. Dengan demikian, ikatan primordial itu merujuk kepada segala hal yang berakar pada unsur-unsur yang selalu ada sesuatu yang *given* di dalam kehidupan sosial, seperti rasa kebersamaan terutama yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Tetapi di atas itu semua, adalah lahirnya seseorang di dalam komunitas keagamaan tertentu, berbicara dalam satu bahasa tertentu (misalnya bahasa daerah), adanya pertalian darah, adanya upaya mematuhi berbagai praktek yang terjadi di dalam kehidupan sosial, seperti mematuhi berbagai norma perilaku, kaidah-kaidah yang menyangkut tata cara dan sopan santun (etiket), serta adat-kebiasaan yang berlaku yang dianggap memiliki kekuatan memaksa dan keberadaannya tidak dapat dihindari.

dan nilai-nilai sosial di mana seluruh norma, kaidah, dan nilai-nilai sosial itu akan tetap bertahan eksistensinya di dalam masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar semua kepentingan individu, kepentingan kelompok, dan kepentingan golongan dikesampingkan sementara dan mendahulukan kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu diperhatikan mengenai sumber-sumber konflik, harus digali pula potensi untuk menanamkan rasa toleransi, juga melihat bagaimana pandangan anggota dari suku-suku bangsa itu terhadap sesama suku bangsanya dan terhadap suku bangsa serta terhadap golongan lain terkait dengan (konsep) integrasi. Dengan melihat itu semua maka potensi konflik dapat dieliminasi semaksimal mungkin dan potensi toleransi dapat dikembangkan seluas mungkin.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak merdeka hingga sekarang, ternyata keragaman yang ada itu tidak selalu mendapat penghargaan sebagaimana adanya, padahal proses pembentukan bangsa itu sangat ditunjang oleh kesatuan etnik yang sesungguhnya memiliki jaringan atau setidaknya ikatan dengan kesatuan etnik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kesatuan itu berakar pada kelompok-kelompok etnik atau suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Memang, pluralitas tersebut sering kali mendapat tekanan yang kuat untuk mengkristalisasikannya ke dalam suatu konsep persatuan dan kesatuan bangsa, namun hal itu kadang merupakan sesuatu yang direayasa karena adanya berbagi kepentingan, sehingga konsep persatuan dan kesatuan itu terasa semu eksistensinya. Di balik itu juga, justru upaya-upaya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu sebenarnya disebabkan adanya keinginan untuk memunculkan sikap dominasi yang bersifat hegemonistik dari suatu suku bangsa atas suku bangsa lain dengan dalih menjadi stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Lihat saja dampak dari hal ini, berbagai macam peristiwa konflik dan kekerasan yang bernuansa kesukuan dan primordialistik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia justru seolah-olah menggambarkan ketimpangan, bukan lagi keseimbangan, dari eksistensi pluralitas. Hal itu ditambah lagi dengan persoalan-persoalan separatisme yang terjadi di berbagai daerah yang seolah-olah sudah jenuh dengan perlakuan-perlakuan pemerintah pusat dalam kerangka integrasi yang dirasa tidak adil oleh daerah, merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara arif.

Semua kejadian, konflik dan kekerasan, itu seolah muncul dengan begitu saja, secara spontan, tanpa antisipasi yang jelas. Sepertinya semua timbul di luar perhitungan. Barangkali inilah dampak dari proses modernisasi dan

pembangunan yang dijalankan selama ini. Perbedaan etnik, kesenjangan sosial ekonomi, pemilahan budaya, atau juga perbedaan pandangan hidup dan agama yang dianut, termasuk perbedaan pemahaman atau persepsi atas konsep-konsep dan pelaksanaan pembangunan, kesemuanya memungkinkan timbulnya berbagai konflik yang memicu kekerasan dan menelan banyak korban. Ada yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah atau mereka yang perkompeten dalam urusan ini, terkait dengan proses pembangunan yang merupakan permasalahan yang sangat serius, yaitu *pertama* adanya ketimpangan atau ketidak seimbangan antara pembangunan yang dilakukan di Jawa dan di luar Jawa. *Kedua*, adanya kesenjangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). *Ketiga*, tidak terjadinya transformasi ekonomi di beberapa daerah sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak seimbang di semua daerah. *Keempat*, kurangnya keterkaitan pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, misalnya Propinsi A membangun jalan raya propinsi sering kali tidak diikuti oleh propinsi B dalam membangun jalan raya yang dapat menghubungkan antara kedua propinsi itu. *Kelima*, kebijakan dalam pengaturan struktur kependudukan yang kurang berpijak pada potensi kebudayaan dan kewilayahan dari wilayah tertentu. *Keenam*, masih lemahnya prasarana dasar pembangunan di wilayah-wilayah tertentu.

Dapatkah Anda menjelaskan unsur-unsur apa saja yang dapat menimbulkan konflik?

Timbulnya konflik dan permasalahan yang diuraikan di atas memang tidak dapat dihubungkan secara langsung sebagai akibat eksistensi pluralitas di Indonesia. Karena hal itu juga sangat berhubungan erat dengan pengelolaan negara dan bangsa oleh para penguasa. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia seolah hanya slogan semata tanpa implementasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Barangkali kurangnya pemahaman mengenai demokrasi yang dilandasi oleh kenyataan pluralitas yang dimiliki masyarakat bangsa Indonesia itu menyebabkan timbulnya upaya-upaya pemaksaan untuk membentuk keseragaman demi menciptakan integrasi. Tetapi kemudian integrasi itu menjadi semu adanya karena demokrasi yang diterapkan bukan mengakar pada keragaman yang dimiliki. Demokrasi dan integrasi, oleh karenanya, menjadi gambaran upaya-upaya

dalam meletakkan kepentingan golongan tertentu demi memuluskan kiprah mereka di kancah politik. Sentralisasi, yang diterapkan pada pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru, seolah merupakan pelecehan terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal-etnik, dan di sisi lain justru makin menancapkan cengkeraman pemerintah pusat dalam ‘menguasai’ (pemerintah daerah). Hegemoni inilah yang merupakan salah satu bibit disintegrasi bangsa karena primordialisme menjadi sangat kental dengan bibit disintegrasi bagi masyarakat bangsa Indonesia yang beragam (Patji, dalam *Indonesia Menapak Abad 21*)

Kemajemukan masyarakat Indonesia, seperti ditegaskan oleh Geertz (1973) yang merupakan benih-benih timbulnya sentimen primordial (*primordial sentiment*) dapat merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengembangkan rasa kebangsaan yang didasarkan pada nasionalisme. Meskipun sentimen primordial itu, yang dalam bentuk ikatan-ikatan keluarga, sudah terbukti dapat menjadi dasar yang kuat bagi tegaknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lalu, tetapi untuk dijadikan landasan menegakkan ke-Indonesia-an dalam wadah negara bangsa (*nation state*) masih dianggap sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, perlu suatu *integrative revolution* yaitu suatu gerak yang mengarah kepada integrasi masyarakat ke dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas yang dapat mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menanamkan rasa nasionalisme (Amal dan Armawi, 1998). Hal ini sebenarnya untuk meminimalkan atau mengeliminir berbagai potensi sebagai unsur-unsur yang dapat menyebabkan disintegrasi politik yang diakibatkan oleh kekecewaan terkait dengan masalah-masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Transformasi sosio-kultural pada hakikatnya memang merupakan (upaya-upaya) transformasi nilai-nilai dan simbol-simbol kebudayaan daerah untuk menciptakan kebudayaan nasional. Atas hal itu maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, seperti semangat kebersamaan, gotong-royong, atau juga sikap toleransi yang dimiliki oleh semua duku bangsa yang kemudian ditransformasikan sebagai wacana kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, menurut Lazlo (1999), dalam mengembangkan semangat kebersamaan dalam konsep keragaman budaya haruslah disadari bahwa tiap budaya yang ada itu perlu berkembang dengan hak-haknya sendiri, serta harus menghormati akar dan tradisi yang tumbuh di dalam nilai-nilai di mana masyarakat hidup secara harmonis dengan budaya lain. Dengan demikian, masyarakat yang pluralis haruslah berupaya mewujudkan kepentingan secara

bersama di mana kepentingan bersama itu akan dapat ditemui melalui komunikasi untuk saling mengerti dan memahami, serta bekerja sama dalam mewujudkan integrasi budaya. Hanya saja, upaya-upaya dalam mewujudkan integrasi budaya nasional itu masih menimbulkan friksi di sana-sini, di mana menurut Kuntowijoyo (1998) hal ini merupakan kesalahan berpikir di mana integrasi budaya dianggap sebagai suatu konsekuensi logis dari integrasi politik. Integrasi budaya ini juga sering kali meminta biaya sosial yang sangat besar. Apa yang dikemukakan Patji (2001) barangkali dapat menggugah pemikiran kita manakala kita memikirkan mengenai integrasi nasional, kita hanya memikirkan integrasi politik dan militer serta melupakan integrasi kebudayaan di mana integrasi kebudayaan ini selalu kita lihat sebagai konsekuensi logis dari suatu integrasi politik. Dan atas hal ini kita harus membayar biaya sosial yang sangat tinggi. Lihat saja kehadiran Indonesia di Timor Timur (Timor Leste) yang kebanyakan diwakili oleh suku Sunda pada jajaran militer dan suku Batak pada jajaran Pemda, dua suku dengan latar belakang budaya yang sangat berbeda, di mana kehadiran mereka justru dirasakan sebagai suatu pendudukan oleh masyarakat Timor Timur. Barangkali akan sangat lain ceriteranya apabila pemerintah menggunakan pendekatan kebudayaan dengan mengirim sebanyak-banyaknya orang-orang dari Timor Barat, dari Flores, atau dari Kupang yang masih memiliki rumpun budaya yang sama dengan masyarakat Timor Timur. Menurut Patji (2001) langkah pemerintah dengan mengirim suku bangsa Sunda dan suku bangsa Batak kelihatannya dilandasi oleh sikap politik yang tidak begitu mempertimbangkan faktor-faktor kedekatan budaya etnisitas dalam upaya menangani suatu persoalan bangsa. Hal ini terjadi karena *pertama* bahwa faktor kebudayaan belum sepenuhnya diperhitungkan sebagai suatu perangkat atau alat yang handal dalam upaya untuk mewujudkan kebijakan nasional yang lebih baik. *Kedua*, faktor kebudayaan masih dianggap sebagai sesuatu yang bersifat eksklusif, disinteraktif, teritorial, dan statis sehingga dianggap tidak efektif untuk merespons berbagai persoalan yang terjadi di luar lingkungan sosial. Hal-hal seperti itulah yang dianggap sebagai suatu kesalahan bangsa.

Nasikun (1984), selanjutnya menegaskan bahwa di dalam kehidupan politik, tanda-tanda yang paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan itu terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh adanya perbedaan ras di mana masing-

masing elemen itu hanya sekedar merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis. Sebagai individu juga kehidupan orang Indonesia tidak dapat dikatakan utuh. Lihat saja orang-orang Belanda yang pada masa itu datang ke Indonesia untuk bekerja di mana mereka ini tidak tinggal untuk menetap di Indonesia. Kehidupan orang-orang Belanda ini semata-mata hanya berada di seputar pekerjaan mereka saja, sehingga dalam memandang masalah-masalah sosial, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia bukanlah sebagai seorang warga negara melainkan sebagai majikan (kaum kapitalis) dari buruh-buruh mereka (yang orang Indonesia itu). Meskipun banyak di antara mereka yang tinggal di Indonesia lebih dari 20 tahun akan tetapi sesudah mereka kembali ke negerinya sendiri untuk menghabiskan sisa hidup mereka sendiri, pengetahuan yang mereka miliki tentang Indonesia tidak lebih dari sekedar pengetahuan yang mereka peroleh saat mereka pertama kali datang ke Indonesia. Orang-orang Timur Asing, terutama orang Tionghoa, sama saja halnya dengan orang Belanda. Mereka, orang Tionghoa, datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan bisnis belaka. Dalam pada itu kehidupan golongan Pribumi, seperti halnya orang Belanda dan orang Tionghoa, tidaklah dapat dikatakan utuh. Kehidupan mereka tidak lebih dari sekedar sebagai pelayan di negerinya sendiri. Secara keseluruhan, dari ilustrasi itu, kondisi masyarakat Indonesia pada jaman Hindia-Belanda merupakan suatu masyarakat yang tumbuh di atas sistem kasta tanpa dilandasi ikatan agama. Orang Belanda, orang Tionghoa, dan golongan Pribumi, melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing, berupaya mempertahankan dan memelihara pola-pola pikir dan cara-cara hidup mereka sendiri-sendiri. Akibatnya, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tidak memiliki kehendak bersama, tidak ada *common will*, mereka hidup bersama-sama tetapi berjalan sendiri-sendiri dengan cara mereka masing-masing.

Dalam kehidupan ekonomi, tidak adanya *common will* atau kehendak bersama itu juga terlihat dengan tidak adanya permintaan sosial atau *common social demand* yang dihayati secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Setiap masyarakat politik, mulai kelompok Nomad sampai bangsa yang berdaulat, melalui suatu proses dalam periode waktu tertentu membentuk peradaban dan kebudayaannya sendiri (dengan produk-produknya berupa sastra, seni musik, seni lukis, dsb.) serta menciptakan adat kebiasaannya sendiri berupa sistem pendidikan informal di mana dengan sistem pendidikan itu setiap anggota masyarakat dapat tersosialisasi sebagai

anggota dari masyarakat yang bersangkutan (Furnivall, 1956). Di sini semua kebutuhan kultural, seperti kebutuhan religi, politik, sastra, dan sebagainya., dianggap memiliki aspek ekonomi sehingga semua itu pada akhirnya menyatakan diri secara terorganisir sebagai kebutuhan ekonomi, yakni sebagai permintaan dari masyarakat secara keseluruhan. Hanya saja di dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia pada masa itu, jaman Hindia Belanda, *permintaan* tersebut muncul tidak terorganisir dan hanya bersifat sebagian-sebagian saja (*sectional*). Tidak ada permintaan sosial (*common social demand*) yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat. Masing-masing golongan, golongan Eropa, golongan Tionghoa, dan golongan Pribumi, memiliki permintaan dengan pola yang berbeda-beda satu sama lain. Tidak ada kebersamaan dan pola pikir dalam *common social demand* (Furnivall, 1956). Dalam pada ini Nasikun (1984) menjelaskan bahwa sumber yang membedakan karakter ekonomi majemuk, ia menyebutnya *plural economy*, dari suatu masyarakat majemuk adalah memang karena tidak adanya kebersamaan dalam permintaan sosial oleh semua elemen masyarakat yang menganut sistem ekonomi tunggal atau *unitary economy* dari suatu masyarakat yang bersifat homogen. Apabila proses ekonomi di dalam masyarakat yang homogen itu dikendalikan oleh adanya *common will* atau keinginan bersama maka berbagai hubungan sosial di antara elemen-elemen masyarakat majemuk itu hanya didasarkan pada hubungan ekonomi yang tergambar melalui produksi barang-barang material. Di samping itu, penggolongan masyarakat itu didasarkan pada perbedaan ras, mengakibatkan pola produksi terbagi berdasar perbedaan ras tersebut. Akibatnya masing-masing ras memiliki pola produksi sendiri-sendiri, orang Belanda bergerak dalam bidang perkebunan, orang Pribumi berkecimpung di dalam bidang pertanian, sedangkan orang-orang Tionghoa berusaha di bidang pemasaran dan menjadi penghubung atau perantara antara orang Belanda dengan penduduk Pribumi. Di dalam setiap masyarakat memang selalu timbul konflik kepentingan, begitu Nasikun (1984) menjelaskan lebih lanjut, yaitu konflik kepentingan antara desa dan kota, antara pemilik modal dan kaum buruh, lebih-lebih di dalam masyarakat majemuk konflik kepentingan itu terlihat tajam karena perbedaan kepentingan ekonomi menyatu dengan perbedaan ras.

Memang, konsep Furnivall itu merupakan gambaran dari keadaan masyarakat Indonesia pada jaman Hindia-Belanda, meskipun kini keadaannya lain tetapi esensi dari konsep tersebut masih dapat diterapkan

dalam kondisi masyarakat sekarang ini. Jadi, apa yang dikemukakan Furnivall mengenai masyarakat majemuk itu pada dasarnya merujuk kepada suatu masyarakat dengan sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial di dalam komunitas tersebut, di mana dampak kemajemukan itu dapat dilihat dari *pertama*, bahwa secara keseluruhan, masyarakat itu kurang memiliki loyalitas; *kedua*, tidak memiliki homogenitas dalam konsep-konsep kebudayaannya, dan *ketiga*, masyarakat menjadi tidak dapat saling memahami keinginan-keinginan pihak lain karena kurangnya loyalitas dan sangat beragamnya konsep-konsep kebudayaan yang dimiliki. Pluralitas sosial sangat ditandai oleh adanya berbagai sub-kebudayaan yang begitu beragam dan berstruktur di mana hal ini terlihat dari *pertama*, kurang berkembangnya sistem nilai dan tidak adanya konsensus yang berhasil disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, *kedua* oleh berkembangnya sistem nilai dari berbagai unit sosial yang ada di dalamnya, *ketiga* oleh adanya berbagai konflik sosial, adanya saling ketergantungan, dan adanya proses disintegrasi dari berbagai unit sosial yang ada di dalamnya. Menurut Geertz (Nasikun, 1984), masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang berdiri sendiri tetapi terikat dalam ikatan yang bersifat primordial.

Menurut Nasikun (1984) ada beberapa faktor penyebab terciptanya pluralitas masyarakat Indonesia, antara lain *pertama* karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dengan luas 3 juta mil persegi merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya atas terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Awalnya, ini terjadi ketika nenek moyang bangsa Indonesia itu datang dari daerah Tiongkok Selatan kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, kondisi geografis itu telah memaksa mereka untuk tinggal di daerah yang terpisah-pisah dan terisolasi satu sama lain. Isolasi geografis inilah yang menyebabkan orang-orang itu menempati setiap pulau dari kepulauan Nusantara yang kemudian tumbuh menjadi kesatuan suku-suku bangsa tersendiri. Setiap suku bangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, dan menganggap sebagai suku bangsa tersendiri. Sebagai suatu suku bangsa, mereka memiliki budaya dan bahasa sendiri. Mereka juga mengembangkan sistem kepercayaan sendiri dengan berbagai mitos di dalamnya. *Kedua*, adalah faktor letak geografis Indonesia di antara Samudra Indonesia dengan Samudra Pasifik yang menyebabkan terciptanya pluralitas agama. Atas hal ini pengaruh berbagai kebudayaan asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia melalui para

pedagang atau perantau asing. Lihat saja pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India yang masuk kira-kira abad ke-4 Masehi, dan akhirnya berbaur dengan kebudayaan asli Indonesia. Kemudian masuk pengaruh kebudayaan Islam pada abad ke 13 dan mencapai hegemoninya pada abad ke 15. Di daerah-daerah di mana pengaruh Hindu dan Budha tidak begitu kuat, Islam begitu berpengaruh. Hanya saja di daerah-daerah yang kuat pengaruh Hinduisme dan Budhisme, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi sinkritisme antara Islam, Hindu, dan Budha, termasuk dengan kepercayaan asli yaitu animisme-dinamisme. Masuknya kebudayaan Barat ditandai dengan masuknya orang Portugis ke Indonesia karena kebutuhan akan rempah-rempah dari Indonesia. Kegiatan misionaris Katolik juga ikut menyertai mereka. Ketika Belanda berhasil mendesak orang Portugis maka pengaruh agama Kristen masuk juga ke Indonesia, meskipun pengaruh Kristen Protestan itu hanya pada daerah-daerah yang tidak begitu kuat dipengaruhi oleh agama-agama Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Inilah yang menyebabkan adanya pluralitas agama di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini Nasikun (1984) menjelaskan bahwa Islam modernis terdapat di daerah-daerah yang dianggap strategis dalam jalur perdagangan internasional, terutama di daerah-daerah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Islam konservatif-tradisionalis menempati daerah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan golongan Islam nominal yang biasa *disebut abangan*, terdapat di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Golongan Kristen (Katolik dan Protestan) berada di daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Tapanuli, serta sedikit daerah Kalimantan Tengah, di mana golongan minoritas Kristen tersebar hampir di setiap daerah perkotaan di Pulau Jawa. Sedangkan Hindu Bali (Hindu Dharma) terdapat di Pulau Bali. Perbedaan iklim dan struktur tanah juga, menurut Nasikun (1984), sangat berpengaruh terhadap terciptanya pluralitas regional Indonesia. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah sangat mempengaruhi terciptanya lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia di mana di Jawa dan di Bali banyak pesawahan (*wet rice cultivation*), sedangkan ladang (*shifting cultivation*) terdapat di luar Pulau Jawa. Perbedaan lingkungan ekologis itu pula yang mempengaruhi terjadinya perbedaan dalam sektor kependudukan, ekonomi, dan sosial-budaya antara Jawa dan Luar Jawa. Dihubungkan dengan sikap primordialistik dan realitas majemuk masyarakat Indonesia yang melekat pada masyarakat daerah dan kebudayaan berbagai suku bangsa, hal ini mengundang pertanyaan mengenai

bagaimana bangsa Indonesia dapat mengantisipasi dampak dari berbagai proses transformasi agar tidak menjadi ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini ancaman terhadap ketahanan nasional? Atas hal ini maka sifat pluralitas dan sikap primordialistik itu haruslah ditempatkan sebagai bagian dari *tradisi* atau realitas yang harus diterima eksistensinya, karena kenyataan ini adalah merupakan warisan sejarah bangsa Indonesia. Barangkali yang harus diperhatikan adalah aspek-aspek positif dari tradisi tersebut untuk dikelola secara tepat dengan mengesampingkan unsur-unsur yang bersifat destruktif sehingga tradisi daerah dan suku bangsa yang positif tadi dapat ditransformasikan menjadi tradisi kebangsaan yang kuat demi mempertebal rasa nasionalisme bangsa.

Barangkali apa yang dikemukakan oleh oleh Miriam Budiardjo (Lihat tulisan Miriam Budiardjo *Mencari Sistem Kepartaian yang Cocok*, 1988) dapat memberikan sedikit gambaran dan wawasan kepada kita betapa pluralisme menjadi masalah yang harus diperhatikan di dalam sistem politik kenegaraan, khususnya dalam hal sistem kepartaian yang dianggap cocok dengan keanekaragaman yang kita miliki. Ia memberi gambaran mengenai sistem kepartaian yang digunakan sejak jaman pendudukan Hindia Belanda di mana ada partai yang didirikan atas dasar kegiatan sosial, seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau partai yang secara terang-terangan didirikan atas dasar paham keagamaan/politik seperti Syarikat Islam (SI) dan Partai Katolik. Memang, seperti yang dijelaskan oleh Radjab (1996) mengenai *politik aliran* yaitu mengelompokkan organisasi-organisasi atau tepatnya partai politik beserta berbagai organisasi massa dan pendukungnya yang berakar pada landasan keagamaan atau kebudayaan yang sama yang merupakan basis dan orientasi ideologis bagi partai politik merupakan pencerminan mengelompokkan masyarakat atas dasar ikatan primordial. Namun demikian, ada juga partai (politik) yang didirikan berdasar asas politik sekuler, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Memang pada jaman pendudukan Jepang, seluruh partai yang telah dibentuk pada jaman pendudukan Belanda dibubarkan, hal ini sesungguhnya merupakan upaya Jepang agar seluruh komponen masyarakat *bersatu* dan berkonsentrasi membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Tidak ada kegiatan politik kecuali golongan Islam yang diperkenankan untuk membentuk suatu organisasi yang dinamakan Masyumi. Pada jaman kemerdekaan bermunculanlah partai-partai politik di mana multipartai yang disetujui pemerintah dianggap dapat mewakili berbagai paham dan

kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Maka pada tahun 1955 diadakanlah pemilihan umum yang pertama yang melibatkan 23 partai politik. Meskipun sebenarnya pemilu itu merupakan penyederhanaan partai dalam arti bahwa hanya empat partai besar saja yang sama-sama menduduki 77% dari jumlah kursi di DPR, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kabinet hasil pemilu itu sendiri juga merupakan koalisi dari dua partai besar yaitu PNI dan Masyumi, sedangkan PKI tetap memilih di luar kabinet yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Meskipun kabinet ini mendapat dukungan yang paling besar tetapi ternyata tidak membawa stabilitas yang diharapkan. Karena adanya berbagai masalah di antaranya adanya pergolakan-pergolakan di daerah maka kabinet ini hanya bertahan selama dua belas bulan saja. Demikian pula dengan Kabinet Djuanda yang bertahan hanya empat belas bulan yang lalu direshuffle, diganti dengan Kabinet Djuanda II dan tetap hanya bertahan satu tahun saja. Dalam perjalanan pemerintahan juga terjadi ancaman dari partai-partai politik untuk memboikot sidang konstituante yang kemudian konstituante itu dibubarkan oleh presiden Soekarno dengan memberlakukan kembali UUD 45. Memang, begitu Wilopo S.H. bekas Perdana Menteri Indonesia itu menyatakan, bahwa sistem multipartai dan kabinet parlementer itu tidak dapat membentuk pemerintahan yang kuat dan tahan lama. Negara berkembang itu membutuhkan kabinet yang kuat dan partai-partai itu sebenarnya merupakan benih-benih kekuatan yang dapat menangkal campur tangan atau intervensi pihak asing. Kemudian pada jaman demokrasi terpimpin ditandai oleh dominannya peranan presiden, adanya pembatasan peranan DPR dan partai-partai politik kecuali PKI yang malahan mendapat kesempatan untuk berkembang, serta peningkatan peranan ABRI sebagai kekuatan sosial-politik. Dalam kaitan ini juga Soekarno membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti buruh, tani, pengusaha, pemuda, wanita, wakil golongan agama, wakil daerah, dan wakil ABRI. Komposisi ini mencerminkan pemikiran bahwa di luar partai-partai politik perlu didengar kelompok-kelompok masyarakat dan juga memberi kesempatan kepada mereka dalam berpartisipasi di dalam proses politik. Kemudian juga meskipun pada masa ini ada penyederhanaan partai politik melalui syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah tetapi kenyataannya tetap saja sistem multipartai masih tidak dapat dihindarkan karena PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti masih berdiri meskipun PSI dan Masyumi telah dibubarkan. Riwayat Demokrasi terpimpin berakhir ketika PKI dibubarkan

karena upaya kudeta yang gagal pada 30 September 1965. Bubarnya demokrasi terpimpin memunculkan demokrasi Pancasila. Diawali dengan dibubarkannya PKI melalui Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 dan dibekukannya Partindo yang telah terlanjur menjalin hubungan erat dengan PKI maka mulai muncul polemik mengenai perlu tidaknya merombak struktur politik dan penyederhanaan sistem kepartaian. Saat itu memang partai politik menjadi sasaran hujatan masyarakat karena dianggap memecah belah sebagai akibat dari egoisme mempertahankan ideologi masing-masing partai. Melalui SESKOAD Bandung yang mengadakan Seminar Angkatan Darat dibicarakanlah sistem partai dan pemilihan umum yang cocok bagi Indonesia melalui proses yang sangat panjang baik di dalam seminar maupun di luar seminar itu dicapailah suatu kompromi meskipun kompromi itu masih mendapatkan kecaman dan kritik dari berbagai kalangan, yaitu dengan membuat mengelompokkan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII, dan PERTI. Kelompok lainnya adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI yang tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kelompok ketiga adalah Golkar dengan asas tunggal Pancasila. Ketiga partai inilah yang telah ikut beberapa kali pemilu. Jalannya sejarah politik Indonesia yang digambarkan Berubahnya situasi dan kondisi politik, akhirnya memang menciptakan sistem multi-partai. Ini seolah-olah mengulang sejarah, di mana sistem multi-partai jaman Hindia-Belanda dan pasca kemerdekaan diberlakukan kembali. Dengan telah beberapa kali terjadi pergantian presiden, sistem politik pun berubah. Otonomi makin menguat dan dampaknya adalah bahwa hampir di semua lembaga, baik di pusat maupun di daerah-daerah menerapkan sistem otonomi. Kenyataannya memang sekarang ini kita menganut sistem multi-partai. Karena perubahan kondisi sosial politik, sekarang ini sistem multipartai telah kembali diterapkan. Pemilu tahun 2004 juga dengan mengikutkan banyak partai sebagai kontestan pemilu. Ini menandakan iklim demokrasi di Indonesia sudah mulai berkembang.

Dapatkah Anda menjelaskan hal-hal apa saja yang timbul, terkait dengan pemilu, akibat adanya demokrasi terpimpin?

D. SEDIKIT MENGENAI ETNIS TIONGHOA

Berbicara mengenai golongan etnis Tionghoa, selalu dimulai dengan penjelasan siapa sebenarnya yang dimaksud, sebab dalam kenyataannya golongan ini terdiri dari berbagai kategori kelompok yang pada dasarnya merupakan suatu *continuum* dari yang menganggap dirinya dan dianggap orang lain sebagai orang Indonesia, titik, sampai yang totok, yang di rumah bicara bahasa Mandarin atau salah satu bahasa daerah asal mereka di Tiongkok. Kira-kira di tengah *continuum* ini berada mereka yang dinamakan peranakan, yang di rumahnya bicara bahasa Indonesia dan bahasa daerah di mana mereka bermukim (bahasa Jawa, Sunda, Minang, Minahasa), dan yang sudah menyerap berbagai unsur kebudayaan setempat, akan tetapi masih bisa diidentifikasi sebagai orang keturunan Tionghoa karena beberapa ciri khas dalam adat-istiadat, kehidupan religi dan perilakunya. Dari status kewarganegaraannya, kebanyakan dari mereka adalah warga negara Indonesia (yang WNA menurut sensus 1980 berjumlah 500.000) berkat perundangan kewarganegaraan sejak berdirinya Republik Indonesia, dan kemudian lewat perjanjian Chou-Soenario yang mengharuskan mereka yang dianggap berdwikewarganegaraan (Indonesia dan RRC), untuk dengan resmi lewat pengadilan menanggalkan kewarganegaraan RRC, jika ingin mempunyai kewarganegaraan tunggal Republik Indonesia (dalam jangka waktu antara 1960-1962)..... Berhubung secara sosiologis dan kultural, orang-orang Tionghoa ini merupakan kelompok yang masih dapat diidentifikasi sebagai orang-orang yang memiliki sistem nilai yang berasal dari kebudayaan Tionghoa, saya gunakan istilah etnis Tionghoa bagi mereka. Istilah etnis ini menunjuk kepada kesadaran suatu kelompok akan keturunan atau asal-usul dan kebudayaan serta adat-istiadat yang sama. Maka kita bisa bicara mengenai kelompok atau orang etnis Batak, etnis Sunda, etnis Jawa, dsb. Penggunaan istilah etnis Tionghoa juga menunjukkan bahwa tidak tepat menamakan mereka orang Tionghoa atau Cina atau Hokiau. Mereka adalah warga negara Indonesia dan dari segi ras hampir semuanya bukan orang Tionghoa lagi, karena mereka adalah hasil pencampuran orang Tionghoa dan Indonesia. Istilah Tionghoa atau Hokiau hanyalah berlaku bagi mereka yang warga negara asing (RRC atau Taiwan) atau yang menganggap dirinya asing. Khusus mengenai istilah Hokiau (ini istilah dari bahasa Hokkian), yang berarti 'Orang Tionghoa dalam perantauan' (*overseas Chinesse*) jelas tidak dapat digunakan untuk mereka yang WNI karena istilah ini berasal dari fihak

RRC atau Taiwan yang menganggap orang Tionghoa yang bermukim di luar kedua negara itu sebagai perantau yang suatu saat akan kembali ke negeri asalnya..... Ada yang mengatakan bahwa mengingat betapa pentingnya persatuan bagi kesatuan negara kita, istilah Tionghoa atau Cina dihilangkan saja, tapi apakah sesuai kenyataan? Keberadaan golongan etnis Tionghoa seperti juga *masalah Cina* merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat Indonesia. Namun kita mengetahui bahwa walaupun persentasenya rendah, di Indonesia ada *masalah Cina*. Dalam persepsi masyarakat luas, orang etnis Tionghoa jauh lebih banyak dari fakta sebenarnya. Persepsi ini disebabkan oleh ciri-ciri khas golongan tersebut; secara fisik mereka berbeda dari masyarakat luas; mereka terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu dalam kota besar; mereka terkonsentrasi dalam bisnis, pedagang, pertokoan, perbankan; mereka berbeda dalam adat istiadat dan kehidupan religius; mereka berbeda dalam kebiasaan makan. Semua itu mengakibatkan bahwa mereka sangat ‘*visible*’ dan karena jumlahnya kecil, sangat *vulnerable* dan tak berdaya (*powerless*) sehingga jika terjadi kerusuhan dan apapun asal mulanya, mereka selalu terkena tindakan destruktif. (sebagai referensi, baca buku karangan Siswono Yudhohusodo yang mengupas mengenai masyarakat etnik Cina di Indonesia)

Aspek ekonomi umum dianggap sebagai sumber sengketa utama dalam hubungan antara etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas dan masyarakat luas sebagai mayoritas. Tuduhan yang biasanya dilontarkan kepada golongan etnis Tionghoa adalah bahwa mereka mempunyai kedudukan ekonomi yang tidak wajar dibanding dengan jumlahnya dan terutama dengan statusnya sebagai keturunan asing walaupun warga negara Indonesia. Kedudukan dalam ekonomi ini dilihatnya sebagai warisan jaman kolonial ketika para penjajah memberi kemudahan-kemudahan kepada mereka untuk mendapat suatu tempat khusus dalam perekonomian. Akibatnya adalah bahwa sampai saat ini kedudukan yang kuat di dalam ekonomi ini masih tetap bertahan, bahkan ada yang mengatakan bahwa kedudukannya bertambah kuat sehingga pengusaha *pribumi* menganggap mereka sukar untuk ditandingi maka sering disebut sebagai saingan yang ‘tidak fair’. Tidak dapat disangkal bahwa dengan mulainya orde baru yang menekankan pembangunan ekonomi, kesempatan sangat terbuka bagi mereka yang berminat dan atau berbakat untuk menjadi pengusaha. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh golongan etnis Tionghoa. Kita lihat bahwa mereka yang sekarang terkenal sebagai pengusaha besar adalah ‘orang baru’, para pendiri dari usahanya yang

muncul dan berkembang sejak orde baru, seperti William Suryajaya, Liem Sioe Liong, Ciputra, Mochtar Riyadi, Yan Darmadi, Masagung, Surya Wonowidjojo (alm.), Nyoo Han Siang (alm.) Yang menarik adalah bahwa mereka menjadi terkenal baik secara nasional dan internasional tidak hanya karena keberhasilan mereka dalam bidang ekonomi, tetapi juga karena usaha-usaha di dalam bidang sosial. Dapat disebut di sini Yayasan Prasetya Mulya, yang didirikan atas prakarsa sejumlah pengusaha besar keturunan Tionghoa, yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan suatu lembaga studi manajemen, sejumlah gedung sekolah dan berbagai kegiatan sosial serta pembinaan olah raga. Pada kenyataannya, tidaklah dapat disangkal bahwa mereka telah memberi sumbangan yang berarti bagi pemulihan dan perkembangan ekonomi Indonesia sejak Orde Baru di damping adanya minyak dan gas bumi serta bantuan dan investasi dari luar negeri. Akan tetapi, bagaimana pandangan masyarakat luas, terutama pemerintah dan pengusaha *pribumi* terhadap peranan mereka? Dari berbagai peraturan sejak permulaan kemerdekaan sampai saat ini terlihat adanya suatu sikap mendua, atau lebih tepat dikatakan ada suatu *love-hate-relationship*. Di satu pihak, nalar berbicara dengan mengakui bahwa peranan mereka diperlukan dan merupakan hal yang positif bagi pembangunan ekonomi. Tetapi di lain pihak, perasaan dan emosi berbicara dengan mengatakan bahwa tidak wajar keturunan asing mempunyai peranan ekonomi yang begitu besar dibanding dengan peranan *pribumi*. Berbagai usaha dari pihak etnis Tionghoa, seperti Christian Wibisono dan Kwik Kian Gie untuk menetralkan pandangan tersebut dengan mengemukakan bahwa porsi atau kekuasaan terbesar dalam ekonomi berada di tangan pemerintah dan investor asing justru menimbulkan polemik yang cukup sengit dan berkepanjangan.

Sejauh mana suatu kelompok tereintegrasi dalam suatu masyarakat, artinya, mempunyai hubungan yang fungsional dan berarti dalam masyarakat tersebut, dapat diukur dari luasnya dan intensitas hubungan itu pada taraf individu atau kelompok. Jika hubungan itu ada pada taraf kelompok primer (*primary group*) artinya terdapat pergaulan sebagai teman akrab yang bisa menuju ke teman hidup secara wajar dan normal. Di sini kita bisa mengatakan bahwa kelompok itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang bersangkutan di mana asal-usul keturunan serta kesukuan tidak dipersoalkan atau tidak relevan. Lalu bagaimana dengan golongan etnis Tionghoa dalam masyarakat luas Indonesia? Kita mengetahui bahwa tuduhan lain yang selalu dilontarkan kepada golongan ini adalah

eksklusivisme. Yang dimaksud dengan istilah itu adalah persepsi masyarakat luas bahwa mereka hanya mau bergaul dengan kaumnya sendiri dan ini disebabkan oleh perasaan superioritas mereka. Kelanjutan dari tuduhan ini adalah bahwa mereka tidak sudi kalau anak perempuannya dipersunting laki-laki *pribumi*. Perasaan superioritas itu memang ada, terutama pada golongan tua. Hal ini merupakan sisa warisan zaman kolonial yang diperkuat dengan keterbatasan kemungkinan pergaulan pada taraf yang sama pada waktu itu. Tetapi sejak kemerdekaan, kemungkinan pergaulan telah terbuka dengan bertambahnya kesempatan untuk melakukan hal-hal bersama, seperti sekolah bersama, berolah raga bersama, berkesenian bersama. Kebersamaan atau *sharing* inilah yang dapat memupuk perasaan saling memiliki dan dimiliki atau *sense of belonging*. Hal ini sesungguhnya sudah terlihat pada angkatan muda, masalah perkawinan campuran yang terjadi dengan wajar antara pria *non-pri* dengan wanita *pri* maupun antara pria *pri* dengan wanita *non-pri* yang makin bertambah. Hal lain yang dianggap ganjalan dalam hubungan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat luas adalah masih adanya unsur-unsur kebudayaan yang berasal dari *negeri leluhur*. Ada sementara pihak, termasuk di kalangan pendidikan, yang beranggapan bahwa unsur-unsur yang asing itu harus dihilangkan. Atas hal ini kita harus hati-hati dengan pemikiran untuk meniadakan unsur-unsur kebudayaan atau sistem nilai suatu kelompok agar tidak terjadi keadaan kultural (seperti yang dikhawatirkan di Singapura sekarang ini) atau malah hilangnya unsur-unsur yang sebenarnya harus dipertahankan. Jadi, kita perlu lebih mengenal sistem nilai golongan etnis Tionghoa, apa yang masih hidup yang diwariskan oleh generasi tua, dan apa yang hilang dengan sendirinya. (Lihat tulisan Melly G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa dalam Pembangunan*, 1988). Radjab (1966), dalam konteks ini mensinyalir bahwa sebenarnya hubungan-hubungan disosiatif pribumi dengan non-pribumi tampaknya menjadi agenda politik utama nasional sejak lama sampai sekarang. Padahal sudah beberapa kali meledak di beberapa kota di Pulau Jawa dan juga di Luar Jawa. Apakah kejadian ini karena adanya perbedaan absolut dalam kebudayaan yang tidak dapat dipersatukan? Tampaknya ledakan konflik SARA yang beberapa kali terjadi di berbagai tempat antara kaum *pri* dan *non-pri* lebih banyak disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi, dan bukan karena perbedaan kebudayaan. Dan apabila kita merujuk kepada penyebab munculnya gerakan separatis yang juga terjadi di beberapa tempat di Indonesia maka negara bangsa yang pluralistik memang selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan instabilitas, bahkan

disintegrasi, dan bukan karena persoalan primordialisme yang menggambarkan perbedaan kebudayaan. Jadi, lebih kepada aksesibilitas (kepada sumber daya), kontrol, dan distribusi sumber daya ekonomi yang timpang, serta kesempatan berpartisipasi dalam kancah politik yang tidak merata. Jadi, begitu Radjab (1996) menjelaskan, dalam situasi yang timpang secara ekonomi dan politik itu ada kemungkinan orang-orang yang melihat kesempatannya tertutup lalu mengerahkan massa kelompoknya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya dengan cara memanfaatkan apa yang dinamakan dengan loyalitas tradisional yaitu melalui ikatan primordialisme. Sebaliknya juga, kelompok yang berada pada posisi yang diuntungkan oleh adanya situasi yang timpang itu juga memanfaatkan loyalitas tradisional untuk mengerahkan kelompoknya dalam rangka mempertahankan kedudukannya. Jadi, sebenarnya, yang menjadi persoalan di dalam proses integrasi masyarakat yang pluralistik itu, bukan terletak pada kemajemukannya (pluralitasnya) itu sendiri, khususnya bukan pada faktor perbedaan kebudayaannya, melainkan pada ketimpangan sektor ekonomi dan politik. Memang, dalam konteks ini, kebudayaan merupakan konsep yang bersifat laten yang dapat membuat masyarakat menjadi disintegratif, hanya saja sifat laten itu tidak akan muncul manakala tidak ada ketimpangan dalam sistem ekonomi dan politik. Harus ada proses demokratisasi di dalam sistem ekonomi dan politik sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam aksesibilitasnya. Menurut Radjab (1996) sistem ekonomi dan sistem politik itulah yang merupakan faktor pemicu dari konflik antar-agama, suku bangsa, daerah, maupun antara golongan minoritas dan mayoritas di dalam kehidupan sosial.

Hanya saja, barangkali dalam konteks Indonesia, yang menjadi persoalan dan menimbulkan konflik dan pertikaian adalah masalah pluralisme agama. Untuk ini, kelihatannya diperlukan refleksi baru mengenai agama, budaya, dan masyarakat dalam konteks pluralisme yang setidaknya merujuk pada tiga bentuk pemahaman mengenai pluralisme (Ruslani, 2005), yaitu *pertama* sikap kita terhadap pluralitas itu sendiri di mana berbagai persoalan yang sering muncul adalah mengenai hubungan kita dengan agama atau budaya lain. Yang perlu dilakukan di sini, adalah bagaimana mendamaikan klaim-klaim kebenaran yang kita yakini dengan klaim-klaim kebenaran pihak lain untuk menghindarkan fanatisme. Dalam kaitan ini menjadi sangat penting menumbuhkan kesadaran mengenai pluralitas agama sebagai isyarat bahwa masing-masing agama memiliki unsur-unsur yang khas, yang sangat spesifik,

yang tidak dapat dieliminir dan tidak dapat dibandingkan. Sehingga harus dicari skema yang tepat yang dapat diterapkan untuk mewedahi dan memaknai pluralitas agama demi terciptanya perdamaian. *Kedua*, kepedulian terhadap eksistensi agama-agama yang berbeda serta perhatian yang lebih terfokus pada komunikasi antar-agama. Di sini, persoalan yang sering diangkat ke permukaan adalah berbagai prasyarat dan tujuan yang digunakan untuk komunikasi antar-umat beragama serta konsekuensi-konsekuensi dari komunikasi yang dilakukan terhadap pemahaman agama masing-masing. *Ketiga*, timbulnya berbagai persoalan mengenai pluralitas agama di mana upaya-upaya yang ada itu difokuskan untuk menjawab berbagai persoalan yang sangat spesifik, sangat khas, dari konsep-konsep yang sangat mendasar yang menyangkut pluralitas agama dan pertemuan antar-agama. Atas hal ini, kemudian dirumuskan berbagai upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep tersebut pada level praksis dalam kaitannya dengan hubungan antar-agama.

E. CATATAN KECIL TENTANG NURCHOLIS MADJID

Menurut Nurcholis Madjid (2005) pluralisme itu haruslah disikapi secara positif, baik itu yang menyangkut intraumat (Islam) maupun antar agama. Menurutnyanya, Islam sangat menuntut toleransi. Islam memang agama yang toleran. Hal ini ditegaskan oleh Von Magnis Suseno, bahwa cak Nur (Nurcholis Madjid) memperlihatkan hakikat agama Islam yaitu Islam dalam arti *penyerahan* kepada Tuhan. Maka, siapa pun orang yang menyerahkan diri pada Tuhan, meskipun bukan orang Islam, dan dalam pengertian agama Islam, tetap dapat diselamatkan. Cak Nur, menurut Von Magnis, justru tidak mengorbankan nilai ke-Islamannya, tetapi menunjukkan atas dasar agama Islam pun, orang di luar Islam dapat selamat. Pertimbangan teologis ini sangat mendalam dan memperkuat dasar toleransi positif. Sebab memungkinkan kita dengan tenang melihat orang lain dalam kelainan (perbedaan) kepercayaan, tanpa merendahkan kepercayaan kita sendiri. Yang menarik dari Cak Nur ialah bahwa ketika berhadapan dengan pikiran-pikiran teologis, adalah sikapnya yang terbuka. Tidak merasa paling benar. Simak saja ketika ia melihat sikap keberagaman seseorang, menurut Cak Nur, hanya Tuhanlah yang berhak mengukur dan menentukan tinggi rendahnya seseorang. Sedangkan manusia harus memandang manusia lain dengan semangat persamaan derajat. Semangat yang ingin digulirkan Cak Nur adalah

semangat dalam rangka pemeliharaan antarsesama umat Islam, *ukhuwwah islamiyyah*. Hanya saja, prinsip ini mendasari segala toleransi antara orang dari agama-agama yang berbeda. Apabila Tuhan yang mutlak membiarkan adanya agama-agama yang berbeda maka Tuhan juga menghendaki agar kita manusia yang tidak mutlak jangan memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Juga dalam hal agama, begitu Cak Nur pernah mengatakan. Dalam konteks ini Cak Nur membedakan antara *agama* dan *paham agama*. Agama adalah mutlak, karena berasal dari Tuhan yang mutlak. Tetap paham agama, cara manusia menyambut agamanya, mengandung unsur-unsur berbeda dalam lingkungan daya dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Menanggapi hal itu, Von Magnis menyatakan ia memahami Nurcholis bahwa kesadaran akan kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, menjadi dasar agar kita tidak menjadi sempit dan tertutup, melainkan terbuka dan rendah hati. Meskipun kita meyakini agama kita sebagai yang benar, tetapi kita tetap harus bersedia belajar dari orang dan budaya lain. Bersedia hidup dan bekerja sama dengan orang-orang lain. Cara berpikir seperti Cak Nur inilah yang kemudian melahirkan banyak tafsir dan memunculkan perbedaan di kalangan umat Islam. Tetapi bukankah perbedaan membawa berkah, seperti Tuhan menciptakan manusia dan membiarkan manusia dalam aneka ras, warna kulit, dan agama yang berbeda-beda. Untuk itu tidak perlu rasanya kita gontok-gontokan dalam hal perbedaan pandangan. Apapun Cak Nur telah berbicara soal inklusivitas, keterbukaan, soal kebebasan berpikir, dan sikap menisbikan kebenaran berpikir dan asumsi kelompok sendiri. *Kebenaran* bukanlah sesuatu yang telah selesai, melainkan sesuatu yang harus dicari terus menerus.

Nurcholis Madjid memang telah menjadi ikon cendekiawan yang konsisten. Baginya, seorang cendekiawan itu tidak berumah di awan, tetapi justru harus di bumi. Ia mengusung spirit pluralitas bukan hanya dalam wacana, melainkan juga di dalam dunia nyata. Harus diakui dan tidak perlu ditutup-tutupi bahwa agama dan etnik memang sering menjadi faktor konflik horizontal. Dan celaknya para petualang politik sering memanfaatkan situasi ini untuk *bermain*. Konflik Ambon yang memakan korban tewas ribuan orang itu, merupakan salah satu contoh yang amat nyata dan berjejak amat jelas. Belakangan ini persoalan bernuansa SARA juga tengah muncul ke permukaan, yakni penutupan tempat ibadah kaum kristiani di beberapa tempat. Beberapa tokoh politik dan agama, Sabtu (04 September 2005) melakukan jalan kaki damai di Jakarta, mengusung spirit kebebasan

beragama. Di antara mereka ada rohaniawan Franz Magnis Suseno, Pendeta Shephard Supit, dan Wakil Sekjen Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Weinata Sairin. Bahkan mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid ikut serta. Sebelum jalan damai, beberapa tokoh agama Kristen dan Katolik juga menemui Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab untuk berdialog. Mereka membicarakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri yang bertarih 1969, yang menurut kaum Kristiani, SKB itu menyulitkan izin pendirian gereja. Harian ini memuji jalan dialog yang menjadi pilihan para tokoh agama itu. Inilah mestinya yang harus kita pilih setiap menghadapi perbedaan pandangan. Selama ini dari kalangan muslim, yang acap terlibat pertemuan lintas agama, hanya tokoh dari organisasi massa besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. FPI jarang diikutsertakan. Justru FPI dan organisasi lain yang bukan *mainstream* itulah yang harus sering dilibatkan di dalam dialog. FPI yang sering diberi stigma ‘Islam garis keras’, ternyata juga bisa diajak musyawarah. Jalan dialog itu juga yang menjadi pilihan Cak Nur dalam memperjuangkan pluralismenya. Ia tidak pernah reaktif dan mengecam secara sarkastik para penyerangnya. Ia tidak pernah mengklaim sebagai yang paling benar. Ia punya kepiawaian menjelaskan apa saja, termasuk agama yang dogmatis itu, dengan rasionalitas yang memukau. Termasuk kepada kawan-kawannya yang berada ‘di seberang’. (Disadur dari: *Media Indonesia*, Senin, 4 dan 5 September 2005).

....keberagaman adalah keniscayaan bagi Indonesia,
 keberagaman adalah sesuatu yang indah.
 Keberagaman merupakan hak azasi manusia dan
 merupakan karunia Illahi. Persatuan amatlah penting
 untuk membangun Indonesia. Kita harus menolak citra
 Indonesia yang militeristik, yang menghadapi
 perbedaan pandangan dengan kekerasan dan
 pemupukan kebencian....

*Kami adalah benang-benang halus yang merajut kembali Indonesia
 Menyusup tak terlihat
 Menisik harapan di balik kebisingan konflik dan huru-hara
 Kami adalah benang warna-warni menenun persaudaraan
 Menjalin keadilan dalam keberagaman.*

(Media Indonesia. 'Upaya Merajut Kembali Indonesia'. 4 September 2005)

Dapatkan Anda menjelaskan mengenai makna pluralitas menurut pemikiran Nurcholis Madjid?



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dapatkan Anda menjelaskan unsur-unsur apa saja yang harus diperhatikan atau dipahami terkait dengan karakteristik pluralitas masyarakat Indonesia?
- 2) Jelaskan mengapa dalam pandangan Furnivall semua kebutuhan kultural itu memiliki aspek ekonomi?
- 3) Jelaskan terciptanya pluralitas masyarakat Indonesia menurut pandangan Nasikun.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dianjurkan untuk mempelajari mengenai.
 - a) kemajemukan yang menggambarkan stratifikasi sosial masyarakat Indonesia;
 - b) konsep kemajemukan menurut Greetz;
 - c) karakteristik pluralitas masyarakat Indonesia.
- 2) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dianjurkan untuk mempelajari mengenai.
 - a) konsep pluralistik masyarakat Indonesia menurut Furnivall;
 - b) karakteristik pluralitas masyarakat Indonesia;
 - c) konsep Furnivall mengenai budaya.
- 3) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dianjurkan untuk mempelajari mengenai.
 - a) konsep pluralistik masyarakat Indonesia menurut;
 - b) karakteristik pluralitas masyarakat Indonesia;
 - d) faktor-faktor penyebab timbulnya pluralitas masyarakat Indonesia.



RANGKUMAN

Pluralitas masyarakat bangsa Indonesia sebagai suatu realitas sosio-kultural dan realitas sejarah harus dilihat sebagai sesuatu yang seimbang, dalam arti bahwa semua konsep, semua wacana, dan semua realitas mengenai pluralitas suku-suku bangsa itu ditempatkan pada tingkatan yang sederajat. Dihubungkan dengan sikap primordialistik dan realitas majemuk masyarakat Indonesia yang melekat pada masyarakat daerah dan kebudayaan berbagai suku bangsa maka sifat pluralitas dan sikap primordialistik itu haruslah ditempatkan sebagai bagian dari *tradisi* atau realitas yang harus diterima eksistensinya, karena kenyataan ini adalah merupakan warisan sejarah bangsa Indonesia. Di mana aspek-aspek positif dari tradisi tersebut harus dikelola secara tepat dengan mengesampingkan unsur-unsur yang bersifat destruktif sehingga tradisi daerah dapat ditransformasikan menjadi tradisi kebangsaan yang kuat demi mempertebal rasa nasionalisme bangsa.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Orang-orang Tionghoa dianggap sebagai golongan yang memiliki kedudukan kuat secara ekonomi dan ini sangat mempengaruhi hubungan dengan suku-suku lain. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari
 - A. Geertz
 - B. North
 - C. Skinner
 - D. Laurell

- 2) Salah satu ciri dari adanya perbedaan status sosial di dalam masyarakat digambarkan dengan adanya
 - A. kepemilikan kekayaan
 - B. pemerataan pendidikan
 - C. status sosial yang homogen
 - D. kekuatan ekonomi yang menciptakan kelas-kelas

- 3) Diferensiasi yang menggambarkan pembagian kerja yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin adalah diferensiasi
 - A. adat
 - B. tingkatan
 - C. struktural
 - D. fungsional

- 4) Salah satu faktor pluralitas suatu bangsa adalah ras yang merupakan ciri fisik seperti warna kulit, warna rambut, postur tubuh, dsb. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
 - A. Geertz
 - B. North
 - C. Skinner
 - D. Laurell

- 5) Hilangnya ciri-ciri atau karakteristik suatu bangsa dapat disebabkan oleh adanya
 - A. akulturasi
 - B. asimilasi
 - C. pengaruh kolektif
 - D. pengaruh industrial

- 6) Unsur-unsur utama di dalam proses integrasi yang dilakukan melalui kelompok primordial menggambarkan suatu
 - A. *primordial sentiment*
 - B. *custom differentiation*
 - C. *rank differentiation*
 - D. *social facts*

- 7) Transformasi sosio-kultural, pada dasarnya mencakup hal-hal di bawah ini *kecuali*
 - A. nilai gotong-royong
 - B. nilai kebersamaan
 - C. sikap toleransi
 - D. masalah SARA

- 8) Adanya perbedaan pola-pola produksi di dalam kehidupan sosial, menurut Nasikun, terjadi akibat adanya
 - A. perbedaan ras
 - B. pembagian kerja

- C. perbedaan ekonomi
D. perbedaan pola pikir
- 9) Pengelompokkan organisasi partai politik yang berlandaskan pada konsep-konsep keagamaan dan kebudayaan yang sama merujuk pada pengelompokkan berdasar
- A. politik aliran
B. politik sekuler
C. organisasi massa
D. orientasi ideologis
- 10) Konflik yang dianggap sebagai sumber sengketa antara etnis Tionghoa sebagai minoritas dengan masyarakat luas sebagai mayoritas, dipicu oleh adanya
- A. perbedaan ras
B. kesenjangan ekonomi
C. perbedaan status sosial
D. aksesibilitas terhadap sumber daya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B (heterogenitas struktur masyarakat): memang konsep keamanan negara salah satunya terkait dengan heterogenitas masyarakat. Semakin heterogen semakin sulit menjaga keamanan, dan sebaliknya
- 2) C (penduduk pribumi yang dianggap sama tinggi derajatnya): artinya pada negara-negara yang tergolong sebagai tipe kedua, justru tidak mungkin penduduk pribuminya dianggap sama tinggi derajatnya dengan para imigran dari Eropa (bangsa kulit putih)
- 3) D (adanya perbedaan mata pencaharian masyarakat): ciri-ciri masyarakat pluralisme horizontal adalah memiliki persamaan adat istiadat, persamaan agama/ kepercayaan, dan persamaan suku bangsa. Bukan persamaan mata pencaharian.
- 4) B (Furnivall): Furnivall memang menganggap bahwa masyarakat majemuk selalu terdiri dari dua elemen atau lebih tetapi tidak dapat membaaur untuk bersatu
- 5) A (Nasikun): Nasikun berpendapat bahwa konflik itu selalu terdapat di dalam masyarakat dengan pola-pola dan intensitasnya sendiri-sendiri.
- 6) B (Seimbang): Pendekatan fungsional struktural memang selalu merujuk pada adanya equilibrium, yaitu keseimbangan sosial.
- 7) D (kelompok dengan ciri-ciri horizontal): pluralisme penduduk pribumi di jaman penjajahan/kolonial Belanda memang menggambarkan ciri-ciri masyarakat dengan perbedaan horizontal
- 8) A (Belgia): Negara yang selalu terlibat ketegangan dengan negara Jerman karena adanya penduduk Jerman yang tinggal di daerah Malmady adalah Belgia
- 9) A (Sikh): Kaum Sikh adalah golongan yang memang ingin memisahkan diri dari India dengan membentuk negara sendiri
- 10) A (Geertz): Geertz memang berpendapat bahwa primordialisme masyarakat Indonesia dapat menghambat upaya penyatuan nasional

Tes Formatif 2

- 1) B (Skinner): Skinner memang berpendapat bahwa golongan Tionghoa ini memiliki kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi suku bangsa lain
- 2) D (kekuatan ekonomi yang menciptakan kelas-kelas): Perbedaan status sosial memang bercirikan adanya kekuatan ekonomi yang dapat menciptakan kelas-kelas sosial
- 3) D (fungsional): diferensiasi yang menggambarkan pembagian kerja berdasar jenis kelamin adalah diferensiasi fungsional
- 4) A (Geertz): Geertz memang berpendapat bahwa salah satu faktor pluralitas adalah adanya ciri fisik individu
- 5) D (pengaruh industrial): Hilangnya ciri suatu bangsa memang dapat disebabkan oleh pengaruh industrial
- 6) A (primordial statement): primordial statement memang merujuk kepada unsur-unsur utama yang terdapat di dalam proses integrasi melalui kelompok primordial.
- 7) D (masalah SARA): masalah SARA memang tidak termasuk ke dalam proses transformasi sosial. Ia mencakup nilai kebersamaan, nilai gotong royong, dan sikap toleransi
- 8) A (perbedaan ras): Memang, adanya perbedaan pola-pola produksi yang terdapat di dalam kehidupan sosial disebabkan oleh adanya perbedaan ras.
- 9) A (politik aliran): pengelompokkan ormas/parpol pada dasarnya merujuk kepada pengelompokkan berdasar politik aliran
- 10) C (kesenjangan ekonomi): Umumnya, konflik antara golongan 'pri' dan golongan 'non-pri' lebih disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi

Glosarium

- Ikatan primordial** : merupakan dasar dari konsep hubungan antaranggota di dalam kelompok primordial di mana hubungan itu bersifat timbal balik atas dasar hubungan darah (ginealogis) maupun hubungan adat yang bersifat kedaerahan.
- Kelompok primordial** : merupakan unit sosial yang hubungan antaranggotanya didasari oleh ikatan primordial.
- Logosentris** : merujuk kepada upaya-upaya penguasa untuk mengubah keragaman agama dan budaya menjadi kekuatan-kekuatan yang mengatur dan menyatukan perbedaan sehingga kemudian menjadi sesuatu dogma yang dinyatakan sebagai 'kebenaran abadi'.
- Pluralisme** : selalu diartikan dengan keragaman atau keanekaragaman. Dalam konteks budaya artinya keragaman budaya. Dalam konteks agama, artinya keragaman agama. Konsep pluralisme sering kali digunakan dalam menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan keragaman budaya dan agama. Secara konseptual, pluralisme merujuk kepada pengelolaan perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan apabila hal itu terkait dengan golongan-golongan yang memiliki kepentingan yang berbeda.
- Primordial** : konsep yang merujuk kepada pemikiran yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan kelompok, cenderung menimbulkan sikap arogansi dan superior golongan.

Primordial sentiment : perasaan atau perasaan-perasaan yang merupakan unsur-unsur utama di dalam proses integrasi yang dilakukan melalui kelompok-kelompok primordial.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Thetford, Norfolk, UK: The Thetford Press Ltd.
- Bachtiar, H.W. (1988). *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Beatty, A. (2001). *Variasi Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi*. Cetakan pertama. Jakarta: Penerbit PT. Rajagrafindo Persada,
- Fischer, L.H. *Inleiding tot de Culturele: Anthropologie van Indonesie*. Yogyakarta: Diterjemahkan dan diterbitkan oleh Keluarga Mahasiswa 'Tri Tunggal' Pusat Yogyakarta.
- Furnivall, J.S. (1956). *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherland India*. New York, USA: New York University Press.
- Furnivall, J.S. (1967). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. England: Cambridge University Press.
- Geertz, H. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin.
- Geertz, C. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Penerbit PT. Dunia Pustaka Jaya. Cetakan Pertama. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin.
- Hisyam, M. (Ed.)(2001). *Indonesia Menapak Abad 21: Dalam Kajian Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Peradaban.

- Hood, L. (2005). *Ghost, Spirits and Schwarzenegger: Children's connections to God in mediated culture*. [URL:<http://Lee.Hood@Colorado.EDU>]. Diakses pada tanggal 24 Juli 2005.
- Koentjaraningrat (1984). *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia. cetakan kesebelas.
- Kuntowijoyo. (1999). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya. cetakan kedua.
- Media Indonesia (2005). *Upaya 'Merajut Kembali Indonesia'*. Minggu, 4 September 2005/No. 9033/Tahun XXXVI.
- Media Indonesia (2005). *Menelusuri Pikiran Plural Cak Nur*. Minggu, 4 September 2005/No. 9033/Tahun XXXVI.
- Media Indonesia (2005). Editorial: Dialog dan Spirit Pluralisme Cak Nur. Senin, 5 September 2005/No. 9034/Tahun XXXVI.
- Mutakin, A. Dan Pasya, RGK. (2003). *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Departemen Pendidikan Nasional.
- Siregar, BB. dan Wahono (Ed). (2002). *Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*. Jakarta: Penerbit FPPM.
- van den Berghe (1967). *Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis*. Dalam Demerath N.J. (Ed). New York, USA and Collier-McMillan Ltd, London: System Change and Conflict. The Free Press,.
- van Peurseun, C.A. (1976). *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, Cetakan Pertama. Diterjemahkan oleh Dick Hartoko.